

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIN) TAHUN 2025

DIREKTORAT PENGEMBANGAN
METODOLOGI SENSUS DAN SURVEI



BADAN PUSAT STATISTIK

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Badan Pusat Statistik disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat selama tahun 2025 kepada Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik. LAKIN ini disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang berisi azas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara. Laporan ini memberikan gambaran mengenai pencapaian visi dan misi BPS dan penyelenggaraan kegiatan sasaran strategis yaitu tersedianya dukungan metodologi sensus dan survei yang tepat guna.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan sampai penerbitan laporan ini. Kami juga mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan laporan pada masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat digunakan sebagai masukan bagi BPS dalam mengevaluasi kegiatan tahun anggaran 2025 dan memberikan rekomendasi pada tahun 2025.

Jakarta, 31 Desember 2025

Direktur
Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei,



Kadarmanto

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi	2
1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran.....	2
1.4. Potensi dan Permasalahan.....	4
1.5. Sistematika Penyajian Laporan	5
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. Visi dan Misi BPS	7
2.2. Target Kinerja Direktorat PMSS 2025-2029.....	12
2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat PMSS Tahun 2025	12
2.4 Dukungan Direktorat PMSS terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025	13
2.5 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.....	24
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1. Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Organisasi Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Tahun 2025.....	25
3.2. Capaian Kinerja Direktorat PMSS Terhadap Target Renstra	39
3.3. Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025	41
3.4. Prestasi dan Inovasi Direktorat PMSS	47
3.5. Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025.....	48
BAB 4. PENUTUP	51
4.1. Kesimpulan.....	51
4.2. Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	51
LAMPIRAN.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Komposisi SDM Direktorat PMSS Menurut Jenjang Jabatan dan Jenis Kelamin	3
Gambar 3.1 Capaian kinerja Direktorat PMSS 2023-2025.....	26
Gambar 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei.....	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pagu Anggaran Direktorat PMSS Tahun 2025	4
Tabel 2.1.	Target Kinerja Direktorat PMSS 2025-2029.....	12
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Direktorat PMSS Tahun 2025	13
Tabel 2.3.	Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Program dan Sasaran Direktorat PMSS Tahun 2025	24
Tabel 3.1	Realisasi dan Capaian Kinerja Direktorat PMSS 2025	25
Tabel 3.2	Perbandingan Capaian Kinerja Total Direktorat PMSS tahun 2023-2025 ..	26
Tabel 3.3	Predikat PKO	27
Tabel 3.4	Interpretasi Predikat PKO.....	28
Tabel 3.5.	Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja 2023- 2025	29
Tabel 3.6	Capaian kinerja Direktorat PMSS terhadap target Renstra.....	40
Tabel 3.7.	Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Program dan Sasaran Direktorat PMSS Tahun 2025	48
Tabel 3.8.	Pagu dan Realisasi Anggaran Setelah <i>Self Blocking</i>	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pernyataan Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Tahun 2025.....	53
Lampiran 2	Jumlah Pegawai Direktorat PMSS menurut Tingkat Pendidikan tahun 2025	55
Lampiran 3	Jumlah Pegawai Direktorat PMSS menurut Golongan Kepangkatan tahun 2025.....	56
Lampiran 4	Jumlah Pejabat Fungsional Direktorat PMSS tahun 2025.....	57
Lampiran 5	Daftar K/L/Pemda Target Pembinaan Tahun 2025	58
Lampiran 6	Daftar Prestasi/Penghargaan Direktorat PMSS Tahun 2025.....	59
Lampiran 7	Daftar Inovasi Direktorat PMSS Tahun 2025	60
Lampiran 8	Alokasi Anggaran Belanja dan Capaian Kinerja Direktorat PMSS TA 2025	62

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, dan Perka BPS Nomor 39 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (PMSS) mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan statistik dengan cara sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain, serta mengumumkan hasilnya secara berkala atau sewaktu-waktu dan terbuka kepada masyarakat baik instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun perorangan.

Direktorat PMSS mempunyai tugas dan fungsi dari Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 Pasal 36, melaksanakan penyusunan dan pengembangan desain sensus dan survei, standardisasi statistik, klasifikasi statistik, kerangka sampel, dan pemetaan statistik. Sedangkan visi, misi dan tujuan Direktorat PMSS masih merujuk pada visi, misi, dan tujuan Badan Pusat Statistik.

Adapun tujuan BPS yang telah dilakukan sesuai dengan sasaran strategis dari Direktorat PMSS, yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien. Sedangkan sasaran strategis Direktorat PMSS dalam mendukung Sistem Statistik Nasional sebagai tolak ukur pencapaian kinerja untuk setiap tujuan, yaitu:

1. Terwujudnya Standardisasi Metodologi Kegiatan Statistik, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) adalah: Tingkat Ketersediaan Metodologi Kegiatan Statistik yang Terstandar dan Terimplementasikan.
2. Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, dengan IKSS adalah: Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei.

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2025 Direktorat PMSS melaksanakan berbagai kegiatan yang mengacu pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) yang terdiri dari beberapa kegiatan. Kode dan nama kegiatan yang menjadi tanggung jawab Direktorat PMSS adalah [2900]. Rata-rata capaian sasaran di atas 100 persen.

Pelaksanaan program tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 54 dan telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Direktorat

PMSS tahun 2025, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja dan akuntabilitas Direktorat PMSS menunjukkan keberhasilan karena mencapai target pencapaian kinerja. Kesimpulan ini tercermin dari angka rata-rata pencapaian kinerja sasaran sebesar 107,94 persen. Tingkat pencapaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Direktorat PMSS telah sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi visi dan misi BPS.

1.1. Latar Belakang

Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (PMSS) merupakan unit kerja Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengemban tugas pemerintah untuk pengembangan desain sensus dan survei, standardisasi statistik, klasifikasi statistik, kerangka sampel, dan pemetaan statistik.

Sebagai perwujudan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP), UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbandingan Negara, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem AKIP meliputi Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja. Sistem ini merupakan suatu instrumen untuk menciptakan transparansi instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional, serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Pada awal tahun 2025, Direktorat PMSS menetapkan target kinerja dari setiap indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat PMSS 2025. Realisasi dari target yang telah ditetapkan pada awal tahun tersebut dipantau setiap triwulanan dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja interim (pelaporan capaian kinerja triwulanan) dan laporan kinerja tahunan.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PMSS Tahun 2025 merupakan perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2025. Laporan ini pun akan digunakan sebagai umpan balik dalam memicu perbaikan kinerja Direktorat PMSS di tahun yang akan datang.

1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Direktorat PMSS berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagai berikut:

1. Kedudukan

Direktorat PMSS berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik.

2. Tugas

Tugas Direktorat PMSS menurut Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Bagian Ketiga Pasal 36 adalah melaksanakan penyusunan dan pengembangan desain sensus dan survei, standardisasi statistik, klasifikasi statistik, kerangka sampel, dan pemetaan statistik.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat PMSS menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengembangan desain sensus dan survei,
- b. pelaksanaan pengembangan standardisasi dan klasifikasi statistik,
- c. pelaksanaan pengembangan kerangka sampel, dan
- d. pelaksanaan pengembangan pemetaan statistik.

4. Susunan Organisasi

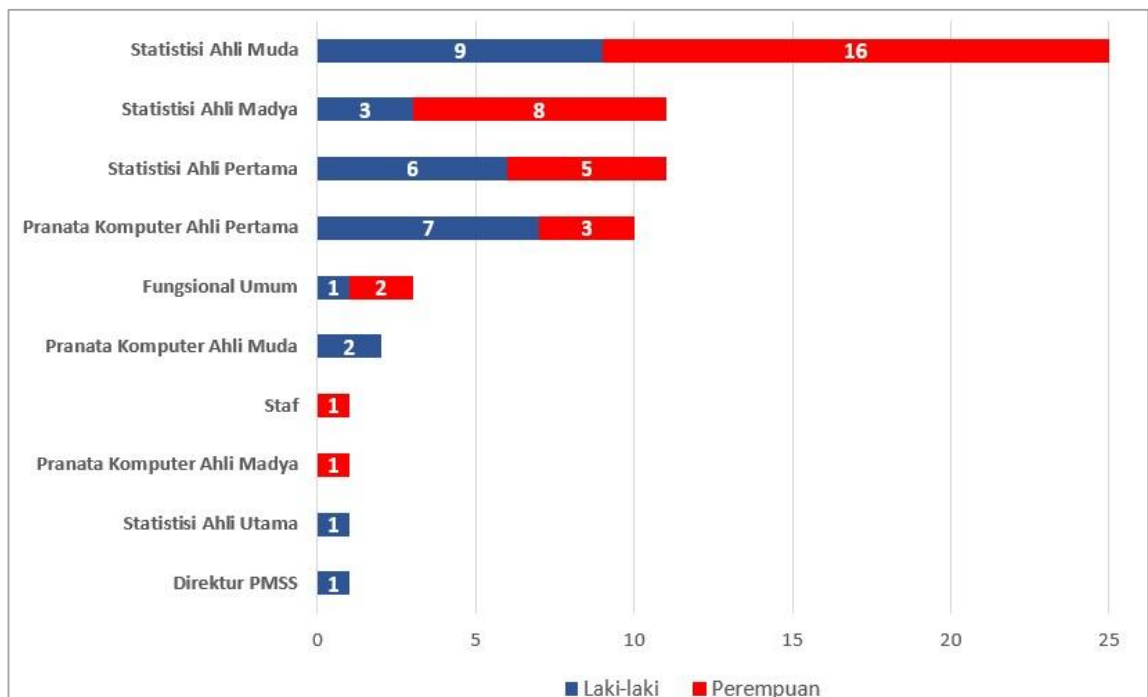
Susunan Organisasi Direktorat PMSS menurut Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Bagian Ketiga Pasal 38 adalah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, BPS melalui Perka BPS Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, dan Perka BPS Nomor 39 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, telah menetapkan susunan organisasi yang baru. Susunan organisasi BPS terdiri dari Kepala, Sekretariat Utama, Kedeputian, Inspektorat Utama, Pusdiklat dan Instansi Vertikal.

Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (PMSS) berada di bawah Kedeputian Bidang Metodologi dan Informasi Statistik. Struktur organisasi Direktorat PMSS terdiri dari Direktur PMSS membawahi Kelompok Jabatan Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer yang secara rinci dijabarkan sebagai berikut.

Pada akhir tahun 2025, SDM Direktorat PMSS seluruhnya berjumlah 66 orang pegawai. Tiga jenjang jabatan terbanyak adalah Statistisi Ahli Muda, Statistisi Ahli Madya, dan Statistisi Ahli Pertama. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, komposisi SDM Direktorat PMSS didominasi oleh pegawai perempuan dengan sebanyak 36 pegawai, dibandingkan pegawai laki-laki yang sebanyak 30 pegawai. Komposisi SDM menurut jenjang jabatan dan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut. Sementara itu, untuk komposisi SDM menurut jenjang pendidikan dan kepangkatan dapat dilihat pada Lampiran 2 dan 3.



Gambar 1.1. Komposisi SDM Direktorat PMSS Menurut Jenjang Jabatan dan Jenis Kelamin

Dalam perencanaan pelaksanaan kinerja, selain SDM, kegiatan yang akan dilaksanakan perlu didukung juga dengan anggaran agar proses kegiatan dapat berjalan baik dan sesuai dengan output yang dicapai. Oleh sebab itu, di tahun 2025 pagu anggaran ditetapkan saat perjanjian kinerja disusun. Pagu anggaran Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei dalam Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik pada awal tahun 2025 sebesar Rp 2.207.040.000,-, sesuai yang tertera pada Perjanjian Kinerja 2025 dan pagu anggaran setelah efisiensi (pagu akhir) sebesar Rp 1.784.099.000,- dapat dilihat pada tabel 1.1. Output yang dihasilkan berupa dokumen, laporan, dan publikasi pengembangan metodologi sensus dan survei.

Tabel 1.1 Pagu Anggaran Direktorat PMSS Tahun 2025

No.	Program	Pagu awal 2025 (Rp)	Pagu akhir 2025 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik			
2900 Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei			
005	Dokumen, laporan, dan publikasi pengembangan metodologi sensus dan survei	2.207.040.000	1.784.099.000
	Jumlah	2.207.040.000	1.784.099.000

1.4. Potensi dan Permasalahan

Dalam perjalanannya mengemban tugas sesuai amanat Perka BPS Nomor 7 Tahun 2020 dan mengacu uraian tugas yang tercantum dalam Perka BPS Nomor 1 Tahun 2009, Direktorat PMSS berupaya memenuhi kebutuhan kegiatan statistik kependudukan, pertanian, dan bidang ekonomi. Namun demikian, Direktorat PMSS terus melakukan pengembangan desain sensus dan survei, klasifikasi dan standardisasi statistik, kerangka sampel, dan pemetaan statistik. Direktorat PMSS harus dapat memberi wawasan dan melakukan pembinaan terkait metodologi sensus dan survei yang mencakup semua aspek. Selain itu, tugas yang tak kalah penting dan menjadi amanat Direktorat PMSS dan BPS secara keseluruhan adalah pembinaan statistik sektoral di bidang metodologi survei serta sebagai pembina standar data dalam implementasi Satu Data Indonesia (SDI).

Dalam mendukung tugas Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik (Deputi MIS) khususnya terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metodologi, Direktorat PMSS mengembangkan penyelenggaraan statistik agar mampu memenuhi kebutuhan pengguna data statistik yang akurat dan semakin beragam. Peran Direktorat PMSS dalam implementasi SDI menjadi sangat penting. SDI membutuhkan standardisasi dalam bentuk petunjuk teknis yang baku terkait penyelenggaraan kegiatan statistik baik dalam hal konsep, definisi, metode penyusunan kerangka sampel, dan penarikan sampel.

Potensi yang dimiliki Direktorat PMSS untuk mencapai sasaran yang ditetapkan adalah:

- a. SDM yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pencapaian sasaran.
- b. Berkembangnya teknologi informasi berbasis geospasial membuka potensi yang besar dalam pengembangan metodologi sensus dan survei.

- c. Tersedianya sistem aplikasi yang dibangun dan dipelihara oleh Direktorat PMSS.
- d. Peningkatan permintaan pembinaan dan kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei.

Pengembangan di bidang metodologi tersebut tidak luput dari beberapa permasalahan yang harus dihadapi, baik yang berakibat pada kegiatan teknis maupun administrasi. Secara umum permasalahan tersebut antara lain:

- a. Terbatasnya sarana (laptop, koneksi internet, ruang penyimpanan dan pengolahan data, server), prasarana (literatur yang cukup dan sesuai dengan kondisi di Indonesia).
- b. Terbatasnya waktu untuk peningkatan kapasitas pegawai di bidang metodologi sensus dan survei yang disebabkan adanya tanggung jawab pekerjaan yang padat pada jam kerja.
- c. Semakin banyaknya permintaan kerja sama dan pembinaan di bidang statistik sektoral belum diimbangi dengan peninjauan beban kerja di unit kerja dan pemahaman tentang peraturan penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan statistik sektoral.
- d. Kendala pemutakhiran wilayah kerja statistik seperti permasalahan batas antar provinsi/kabupaten/kota dan kendala teknis terkait pengolahan peta.
- e. Keterlambatan pengolahan data, keterbatasan akses data, dan perubahan proses bisnis pada waktu menjelang kegiatan menghambat dalam penyusunan metodologi dan daftar sampel.
- f. Dalam rangka memenuhi kebutuhan *Profiling* yang terus berkembang, kendala yang dialami adalah belum terakomodasi oleh FRS.
- g. Tidak ada anggaran pada pelaksanaan *Profiling* SBR, sehingga pemutakhiran melalui *Profiling* SBR baik di Pusat dan Daerah dilakukan *on desk* dengan sumber internet, website perusahaan, informasi usaha/perusahaan yang pernah menjadi sampel survei BPS, dan lain-lain.

1.5. Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SAKIP, Laporan Kinerja Direktorat PMSS Tahun 2025 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang; kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi; sumber daya manusia dan dukungan anggaran; potensi dan permasalahan yang dihadapi Direktorat PMSS; serta sistematika penyajian laporan.

- BAB II. Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi visi dan misi, target kinerja Direktorat PMSS 2025-2029, Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat PMSS Tahun 2025, dukungan BPS/Direktorat PMSS terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025, dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.
- BAB III. Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi realisasi, capaian kinerja, dan nilai penilaian kinerja Direktorat PMSS tahun 2025, capaian kinerja Direktorat PMSS terhadap target Renstra, capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025, prestasi dan inovasi Direktorat PMSS, dan realisasi dan efisiensi anggaran.
- BAB IV. Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi/rencana tindak lanjut untuk tahun berikutnya.

2.1. Visi dan Misi BPS

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis adalah elemen penting dalam perencanaan strategis sebuah organisasi. Visi menggambarkan perencanaan strategis K/L periode lima tahun. Pernyataan visi harus menggambarkan kondisi organisasi yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra. Sementara itu, misi merupakan peran dan tugas utama yang harus dilakukan organisasi untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi bersifat luas dan abstrak dan tidak dapat diukur secara langsung. Kemudian, tujuan adalah pernyataan yang lebih spesifik dari misi. Tujuan bersifat strategis dan menggambarkan fokus organisasi, namun masih belum memiliki ukuran dan indikator yang detail. Di sisi lain, sasaran strategis adalah hasil yang lebih spesifik dan terukur yang ingin dicapai untuk mendukung pencapaian tujuan.

2.1.1. Visi BPS

Visi BPS adalah “Lembaga yang Independen, Tepercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Sebagai lembaga yang independen, BPS menjunjung tinggi objektivitas dan netralitas dalam menyelenggarakan kegiatan statistik. Independensi ini juga menggambarkan kemampuan BPS dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai undang-undang secara profesional, bebas dari intervensi politik, ekonomi, maupun tekanan eksternal lainnya yang dapat memengaruhi integritas, objektivitas, dan akurasi data yang dihasilkan. Cakupan independensi ini meliputi hak otonomi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia, kebebasan dalam menentukan metodologi statistik yang merujuk pada standar internasional, serta kebebasan dalam menentukan jadwal publikasi data. Dengan independensi yang terjaga, BPS dapat membangun kepercayaan publik, memastikan transparansi, dan menyediakan data yang dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan evaluasi pembangunan yang akuntabel.

Sebagai lembaga yang tepercaya, BPS harus menjaga kepercayaan publik sebagai penyedia statistik berkualitas tinggi yang dihasilkan dari metodologi yang transparan dan sesuai standar sehingga dapat menjadi rujukan statistik di tingkat

nasional maupun internasional. Kepercayaan ini dibangun melalui independensi dan integritas dalam pengumpulan dan analisis, konsistensi dalam penyediaan data, serta komitmen untuk menjaga kerahasiaan data pribadi sesuai undang-undang yang berlaku. Dengan kepercayaan yang kuat dari masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, BPS dapat berperan sebagai pilar utama dalam Sistem Statistik Nasional.

Sebagai lembaga yang berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data, BPS menyediakan statistik berkualitas untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif. Dalam hal ini, BPS tidak hanya berfungsi sebagai penyedia statistik, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menganalisis dan menyajikan wawasan yang sesuai dengan kebutuhan kebijakan. Dengan demikian, BPS dapat menjadi katalisator dalam menciptakan kebijakan yang lebih tepat sasaran, transparan, adil, dan berkelanjutan dengan melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan yang baik di tingkat nasional maupun internasional.

2.1.2. Misi BPS

Untuk dapat mewujudkan Visi “Lembaga yang Independen, Tepercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, Badan Pusat Statistik merumuskan tiga misi yang saling terintegrasi sebagai panduan langkah ke depan. Misi Badan Pusat Statistik Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Misi 1: Menyediakan Data Statistik Berkualitas dan Insight untuk Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan.

Misi ini merupakan pondasi utama dalam mewujudkan visi BPS. Data statistik yang berkualitas dan insight yang mendalam sangat dibutuhkan untuk mendukung perumusan kebijakan yang berbasis data. Dengan menyediakan data yang berkualitas, BPS memastikan bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengambil keputusan yang efektif dan terarah. Hal ini sejalan dengan Visi BPS untuk menjadi lembaga yang terpercaya dan berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional. Data yang berkualitas juga menjadi bukti konkret dari independensi BPS karena dihasilkan melalui metodologi yang ilmiah dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu.

Misi 2: Memperkuat Kepemimpinan BPS dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)

Misi ini bertujuan untuk memperkuat peran BPS sebagai lembaga statistik utama di Indonesia yang mengkoordinasikan dan memimpin seluruh kegiatan statistik nasional. Dengan menguatkan kepemimpinan dalam SSN, BPS mengkoordinasi agar seluruh data yang dihasilkan oleh berbagai instansi dan lembaga di Indonesia memenuhi standar yang sama, konsisten, dan dapat diintegrasikan. Hal ini mendukung Visi BPS untuk menjadi lembaga yang independen dan terpercaya karena koordinasi yang baik dalam SSN akan menciptakan data yang konsisten dan terstandar, serta memastikan transparansi dalam proses pengumpulan dan penyajian data. Selain itu, kepemimpinan yang kuat dalam SSN juga memperkuat peran aktif BPS dalam mendukung kebijakan berbasis data.

Misi 3: Menguatkan kapasitas kelembagaan statistik yang efektif dan efisien

Keberhasilan Misi 1 dan Misi 2 membutuhkan kelembagaan yang tangguh. Untuk itu, BPS berfokus pada pengembangan SDM yang unggul, optimalisasi tata kelola organisasi, dan pemanfaatan teknologi mutakhir. Melalui efektivitas dan efisiensi, BPS mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan independen, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi.

Melalui keterpaduan ketiga misi tersebut, BPS berkomitmen untuk menjembatani kebutuhan data nasional dengan perumusan kebijakan yang strategis dan berbasis data. Dengan demikian, Visi BPS sebagai lembaga independen, terpercaya, dan berperan aktif dapat terwujud secara konsisten memberikan manfaat optimal bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

2.1.3. Tujuan BPS

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, BPS menetapkan tiga tujuan strategis yang saling mendukung, yang dirancang untuk memastikan keberhasilan dalam setiap aspek penting dari operasionalnya:

Tujuan 1: Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan Insight yang Relevan. Tujuan ini merupakan fondasi utama dalam mencapai Visi BPS. Dengan menghasilkan statistik berkualitas dan menyediakan wawasan yang relevan, BPS mendukung penyusunan kebijakan yang berbasis bukti. Kebijakan yang disusun dengan data yang tepat dan akurat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap BPS, serta memperkuat peran aktif BPS menyediakan data yang mendukung proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Indikator Kinerja pada tujuan ini adalah Tingkat Pemanfaatan Data Statistik (TPDS).

Tujuan 2: Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien. Keberhasilan BPS dalam menyediakan data berkualitas tidak terlepas dari peran Sistem Statistik Nasional. SSN yang andal, efektif, dan efisien memastikan integrasi, konsistensi, dan akurasi data yang dihasilkan. Tujuan ini berkontribusi secara langsung pada tercapainya Visi BPS sebagai lembaga tepercaya. Dengan memastikan sistem yang kokoh dan terintegrasi, BPS dapat memperkuat posisi strategisnya dalam menyediakan data yang mendukung proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Hal ini akan meningkatkan peran aktif BPS di berbagai level pemerintahan dan masyarakat. Indikator Kinerja pada tujuan ini adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS).

Tujuan 3: Mewujudkan Tata Kelola Badan Pusat Statistik yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif, dan Efisien dalam Menyelenggarakan Statistik. Tata kelola yang baik merupakan landasan yang mendukung kedua tujuan lainnya. Tata kelola yang berkualitas, akuntabel, efektif, dan efisien memastikan bahwa BPS mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan yang pada akhirnya memperkuat kapasitas kelembagaan. Dengan efisiensi dalam operasional dan akuntabilitas yang tinggi, BPS dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya, memperkuat kepercayaan publik, dan mendukung proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data. Indikator Kinerja pada tujuan ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi.

Dengan sinergi ketiga tujuan ini, BPS mampu memantapkan posisinya sebagai lembaga independen, tepercaya, dan berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data sebagai perwujudan Visi Presiden.

Sampai dengan Laporan Kinerja ini disusun visi, misi, tujuan di Direktorat PMSS belum bisa ditetapkan.

2.1.4. Sasaran Strategis BPS

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan Insight dalam Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan

Sasaran strategis pertama BPS berfokus pada peningkatan tingkat pemanfaatan data statistik yang tidak hanya berkualitas dari data statistik, tetapi juga dilengkapi dengan insight atau wawasan yang relevan untuk mendukung proses perumusan kebijakan publik dan pengambilan keputusan strategis. Sasaran ini mencerminkan upaya BPS dalam memperkuat posisinya sebagai penyedia utama informasi statistik yang

dapat dipercaya dan dapat dimanfaatkan secara luas oleh seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini, digunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) berupa Tingkat Pemanfaatan Data Statistik. Indikator ini merepresentasikan sejauh mana data dan informasi statistik yang diproduksi, dianalisis, serta disebarluaskan oleh BPS digunakan secara aktif oleh para pembuat kebijakan, akademisi, pelaku usaha, media massa, dan masyarakat umum dalam merumuskan kebijakan, melakukan evaluasi program, serta mengambil keputusan strategis berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan Terpadu

Sasaran strategis kedua menegaskan komitmen BPS dalam membangun dan memperkuat penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang berkualitas, terintegrasi, dan mampu menjamin konsistensi serta keselarasan data antar-sektor. SSN yang baik menjadi fondasi penting bagi kebijakan publik yang berbasis bukti. Selain itu, dengan adanya penyelenggaraan SSN yang terpadu, seluruh K/L/D/I mampu mendukung perencanaan pembangunan nasional secara komprehensif.

Pencapaian sasaran ini diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) berupa Indeks Pembangunan Statistik (IPS). IPS merupakan indikator komposit yang menilai tingkat kematangan (*maturity level*) penyelenggaraan statistik sektoral pada Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Indeks ini mencerminkan kemampuan kelembagaan dalam membangun ekosistem statistik sektoral yang terstandar, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional

Sasaran strategis ketiga merupakan manifestasi dari komitmen BPS dalam membangun kelembagaan yang menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), menjunjung tinggi integritas, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi penyediaan data statistik. Untuk menilai keberhasilan sasaran ini, BPS menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis berupa Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks ini mengevaluasi tingkat keberhasilan BPS dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi yang mencakup penguatan integritas organisasi, efisiensi proses bisnis, peningkatan akuntabilitas kinerja, dan kualitas layanan publik.

2.2. Target Kinerja Direktorat PMSS 2025-2029

Sebagai dasar menyusun rencana kerja tahunan agar pelaksanaan program dan kegiatan BPS menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien, Direktorat PMSS mengacu pada Renstra BPS 2025-2029 yang sudah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2025-2035 dan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) 2025-2029. Renstra BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2025-2029. Sasaran strategis yang diampu Direktorat PMSS adalah sasaran strategis kedua BPS, yaitu “Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan Terpadu” dengan target kinerja Direktorat PMSS berdasarkan Renstra 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Target Kinerja Direktorat PMSS 2025-2029

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Target Kinerja				
	2025	2026	2027	2028	2029
2.5.2. Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei 2.5.2.1. Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	74,17 poin	79,33 poin	83,33 poin	89,62 poin	93,62 poin
2.7.2. Terwujudnya Standardisasi Metodologi Kegiatan Statistik 2.7.2.1. Tingkat Ketersediaan Metodologi Kegiatan Statistik yang Terstandar dan Terimplementasikan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen

2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat PMSS Tahun 2025

Pada periode 2025, telah ditetapkan indikator kinerja dan target yang harus dicapai oleh Direktorat PMSS yang menjadi ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai unit kerja BPS. Pada tabel di bawah ini ditampilkan perjanjian kinerja yang menjadi tanggung jawab Direktorat PMSS.

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Direktorat PMSS Tahun 2025

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(3)	(4)
Sasaran strategis 2.5.2: Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei		
2.5.2.1. Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral	Poin	74,17
Sasaran Strategis 2.7.2: Terwujudnya Standardisasi Metodologi Kegiatan Statistik		
2.7.2.1 Tingkat Ketersediaan Metodologi Kegiatan Statistik yang Terstandar dan Terimplementasikan	Persen	100

2.4 Dukungan Direktorat PMSS terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025

2.4.1. Dukungan terhadap Prioritas Nasional

Dukungan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei terhadap kegiatan Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan Statistik Sektoral

Sejalan dengan Visi BPS 2025–2029, yaitu “Lembaga yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, salah satu misi yang ditetapkan BPS adalah Menguatkan Kepemimpinan BPS dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN). Misi ini menegaskan peran BPS dalam memastikan bahwa data yang dihasilkan berbagai instansi pemerintah memenuhi standar, konsisten, dan terintegrasi untuk mendukung kebijakan berbasis data.

Peran BPS dalam pembinaan statistik sektoral memiliki dasar hukum pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang mengamanatkan BPS untuk melakukan pembinaan kepada penyelenggara kegiatan statistik dalam rangka pengembangan Sistem Statistik Nasional dan mendukung pembangunan nasional. Pelaksanaan pembinaan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) dilaksanakan oleh Tim Pembina Statistik Sektoral (Tim PSS) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, yang bertugas melakukan sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah provinsi/kabupaten/kota sebagai lokus pembinaan.

Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (PMSS) merupakan salah satu unit kerja BPS di tingkat pusat ditugaskan untuk melakukan pembinaan statistik sektoral kepada 6 (enam) Kementerian/Lembaga yaitu: (1) Badan Informasi

Geospasial (BIG), (2) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), (3) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), (4) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), (5) Badan Standardisasi Nasional (BSN), dan (6) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI).

2. Publikasi/Laporan Penyusunan Inflasi

Dalam rangka mendukung sasaran program prioritas berupa terkendalinya tingkat inflasi nasional sesuai dengan fundamental ekonomi, serta sasaran kegiatan prioritas terkait terjaganya komponen inflasi harga bergejolak, Direktorat Statistik Harga Konsumen telah melaksanakan berbagai aktivitas strategis secara menyeluruh dan berkesinambungan. Upaya tersebut diawali dengan perencanaan anggaran serta penyiapan instrumen pendataan dan metodologi, pengolahan data serta diseminasi.

Untuk mendukung efektivitas publikasi dan promosi data inflasi, Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei bekerja sama dengan Direktorat Statistik Harga menerbitkan data inflasi secara visual melalui *webmap* untuk meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses informasi statistik, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan inflasi. Penyediaan *webmap* peta inflasi merupakan salah satu inovasi dalam penyajian data spasial yang mengintegrasikan informasi inflasi dengan aspek kewilayahan. Melalui *webmap* ini, pengguna dapat memantau dinamika inflasi secara lebih komprehensif berdasarkan wilayah, sehingga mendukung analisis yang lebih tajam serta pengambilan kebijakan yang berbasis data dan bukti.

3. Pemanfaatan Big Data untuk Statistik Resmi

Kegiatan Pemanfaatan Big Data untuk Statistik Resmi mendukung Proyek Prioritas Nasional yang terkait dengan Tata Kelola Data serta Pengembangan dan Pemanfaatan *Emerging Technology*. Penentuan target jumlah dan jenis kegiatan statistik yang memanfaatkan Big Data untuk statistik resmi selama periode 2025–2029 telah dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kapasitas SDM, serta dukungan anggaran yang tersedia.

Pada tahun 2025 aktivitas yang dilakukan berfokus pada optimalisasi pemanfaatan Mobile Positioning Data (MPD) untuk penghitungan statistik pariwisata seperti: Wisatawan Nusantara (Wisnus), Wisatawan Nasional (Wisnas); statistik mobilitas penduduk seperti Commuter, dan statistik ekonomi-sosial melalui indentifikasi wilayah metropolitan (Metropolitan Statistical Area—MSA).

Dalam hal ini, Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (PMSS) memiliki peranan strategis dalam mengawal kualitas pemanfaatan *Mobile Positioning*

Data (MPD) agar selaras dengan prinsip statistik resmi. Peran tersebut mencakup penyusunan dan pengembangan desain survei digital berbasis MPD, termasuk perhitungan kecukupan dan representativitas sampel, pengembangan metode pembobotan dan estimasi yang tepat, serta memastikan konsistensi hasil statistik yang dihasilkan.

Selain itu, Direktorat PMSS berperan dalam memastikan kualitas metodologis pada seluruh tahapan pengolahan MPD, mulai dari integrasi data, penyesuaian bias, hingga validasi hasil melalui pendekatan triangulasi dengan sumber data statistik resmi lainnya. Pengawasan kualitas juga mencakup penyediaan dan pemutakhiran batas wilayah digital (peta) sebagai dasar deliniasi wilayah analisis, termasuk identifikasi wilayah metropolitan (Metropolitan Statistical Area/MSA) dan kawasan destinasi pariwisata, sehingga analisis spasial berbasis MPD dapat dilakukan secara akurat dan konsisten.

Melalui peran tersebut, Direktorat PMSS diharapkan dapat memastikan bahwa pemanfaatan MPD tidak hanya inovatif dari sisi teknologi, tetapi juga memenuhi standar kualitas statistik resmi, mendukung keterbandingan antar waktu dan antar wilayah, serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap statistik yang dihasilkan. Dengan demikian, pemanfaatan Big Data, khususnya MPD, dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan tata kelola data dan pengembangan emerging technology untuk mendukung Proyek Prioritas Nasional pada periode 2025–2029.

Selain kegiatan pemanfaatan MPD, Direktorat PMSS juga memanfaatkan big data untuk bidang statistik pertanian. Teknologi *Big Data* yang berkembang sangat pesat memberikan peluang untuk modernisasi proses bisnis kegiatan statistik, salah satunya adalah pemanfaatan Big Data di statistik pertanian. Teknologi penginderaan jauh/*remote sensing* (RS) atau dikenal juga dengan sebutan teknologi *earth observation* (EO) dapat digunakan untuk menangkap informasi pada permukaan bumi melalui citra satelit seperti informasi tutupan lahan, jenis tanaman, perubahan lahan, dan lain-lain. Penggunaan teknologi EO telah direkomendasikan oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO) untuk memproduksi statistik pertanian yang lebih efektif.

Adanya teknologi EO dan data KSA yang sudah dihasilkan BPS memunculkan peluang untuk pengembangan metodologi dengan memanfaatkan *big data* untuk perhitungan data beras dengan penamaan Mixed Method. Kedua sumber data tersebut digunakan untuk pengembangan model *machine learning* (ML) untuk mengidentifikasi fase tumbuh padi yang selama ini dilakukan melalui kegiatan survei KSA. Diharapkan dengan identifikasi fase tumbuh padi menggunakan teknologi RS, dapat mengatasi

nonresponse pada wilayah yang selama ini sulit terjangkau. Selain itu, penggunaan model RS diharapkan dapat mengurangi anggaran biaya lapangan KSA.

Pada tahun 2024, BPS telah mengembangkan model *machine learning* (ML) untuk memperkirakan luas panen di 10 provinsi, yang selanjutnya dilakukan pengembangan ke 38 provinsi pada tahun 2025. Untuk mendukung implementasi skala nasional tersebut, penyusunan proses bisnis pelaksanaan *mixed method* yang komprehensif, pembangunan sistem yang otomatis dan andal, dan eksplorasi potensi estimasi produktivitas tanaman melalui data EO sudah mulai dilakukan di tahun 2025 dan akan terus dikembangkan hingga tahun 2027.

4. Dukungan Dalam Penyediaan Data dan Informasi Ekonomi Digital

Pelaksanaan Survei E-Commerce 2025 merupakan bagian dari dukungan terhadap Program Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025–2029, khususnya dalam agenda penguatan kemandirian bangsa dan percepatan transformasi ekonomi digital. Perkembangan ekonomi global yang ditandai dengan semakin besarnya peran digitalisasi telah menjadikan e-commerce sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional, tidak hanya dalam mengubah pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat, tetapi juga dalam memperluas akses pasar dan menciptakan peluang usaha baru lintas skala.

Survei E-Commerce 2025 dirancang untuk menyediakan data dan informasi komprehensif mengenai aktivitas usaha e-commerce selama tahun 2024, mencakup karakteristik pelaku usaha, pola transaksi, pemanfaatan teknologi digital, serta tantangan dan peluang pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Informasi yang dihasilkan menjadi dasar penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pengembangan ekonomi digital yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung penguatan Sistem Statistik Nasional. Dalam pelaksanaannya, Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (PMSS) berperan dalam pengembangan desain survei, pengelolaan kerangka sampel, penarikan sampel, penetapan cakupan dan kecukupan sampel, penyusunan metode pembobotan dan estimasi, serta evaluasi kualitas hasil survei.

2.4.2. Dukungan terhadap Prioritas Presiden

Dukungan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei terhadap kegiatan Prioritas Presiden adalah sebagai berikut:

1. Inpres 4 2025 DTSEN

Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam lingkup kerja di Direktorat

Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (PMSS) dilakukan melalui pemanfaatan DTSEN sebagai kerangka sampel induk (*master sampling frame*) dalam kegiatan sensus dan survei BPS. DTSEN sebagai basis data tunggal sosial dan ekonomi pada level individu dan keluarga dimanfaatkan dalam penyusunan *prelist* sensus dan survei, sehingga mendukung ketersediaan daftar awal unit observasi yang lebih mutakhir, komprehensif, dan terstandar. Selain itu, rekapitulasi jumlah individu dan keluarga yang bersumber dari DTSEN digunakan sebagai salah satu dasar dalam penentuan sampel *enumeration area* (EA), serta dalam perhitungan dan pengaturan alokasi beban kerja petugas lapangan.

Selanjutnya, hasil kegiatan pemutakhiran dan listing keluarga yang dihasilkan dari setiap sensus dan survei BPS dimanfaatkan sebagai umpan balik (*feedback*) untuk memperbarui informasi keberadaan keluarga dalam DTSEN, khususnya pada level wilayah terkecil seperti Satuan Lingkungan Setempat (SLS). Dengan mekanisme tersebut, DTSEN dan kegiatan sensus-survei BPS saling memperkuat dalam mewujudkan sistem data sosial dan ekonomi nasional yang terintegrasi, mutakhir, dan berkualitas.

2. Inpres 6 2025 Survei KSA Padi, Survei Ubinan Padi

Pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah, Beras dalam Negeri, serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah dilakukan melalui dua kegiatan statistik utama, yaitu Survei KSA Padi dan Survei Ubinan Padi. Survei KSA Padi mencakup seluruh lahan pertanian, baik sawah maupun bukan sawah, dilaksanakan di 38 provinsi dan 488 kabupaten/kota, dengan metode pengumpulan data berbasis survei (*sampling*) menggunakan CAPI. Sebanyak 281.817 titik amatan dipantau setiap bulan oleh 7.572 petugas dengan metode pengamatan langsung di lapangan. Sementara itu, Survei Ubinan Padi dilakukan untuk memperoleh data produktivitas melalui pengukuran langsung pada 78.626 sampel plot ubinan, dilaksanakan setiap empat bulan oleh petugas BPS. Survei ubinan padi menggunakan pendekatan area berbasis Kerangka Sampel Area (KSA) dengan menggunakan titik pengamatan pada subsegmen KSA sesuai fase pertumbuhan padi. Dengan melibatkan peranan teknologi, terkini, sehingga data produksi padi yang dikumpulkan menjadi lebih akurat, cepat dan tepat waktu. Kedua survei dilengkapi dokumentasi foto kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas.

Dalam rangka menindaklanjuti Inpres ini Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei melakukan:

- a. pembentukan dan pemutakhiran *frame* sampel KSA padi dan menyediakan aplikasi penggantian sampel segmen KSA padi dan jagung setiap bulannya untuk Survei KSA Padi dan Survei KSA Jagung; dan
- b. penarikan sampel segmen KSA padi dalam setiap *subround* untuk Survei Ubinan Padi.

3. Inpres 8 2025 Kemiskinan Ekstrem

Pelaksanaan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem diwujudkan melalui aktivitas utama, salah satunya penghitungan tingkat kemiskinan ekstrem secara berkala.

Dalam rangka menyediakan data dasar yang diperlukan untuk penghitungan tersebut, Direktorat PMSS mengawal perancangan survei yang mendukung ketersediaan data yang diperlukan. Kemiskinan ekstrim dihitung melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Susenas dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Pelaksanaan Susenas Maret 2025 dirancang untuk dapat menghasilkan estimasi kemiskinan di level Kabupaten/Kota dengan jumlah sampel sebanyak 345.000 rumah tangga yang tersebar di 514 Kabupaten/Kota. Sedangkan Susenas September 2025 dirancang untuk dapat menghasilkan estimasi kemiskinan di level Provinsi dengan jumlah sampel 76.330 rumah tangga yang tersebar di 514 Kabupaten/Kota. Dalam setiap periode survei, Direktorat PMSS juga mengawal proses pemilihan sampel, penyediaan prelist untuk pemutakhiran rumah tangga dalam EA terpilih sampel, dan juga mengawal proses penghitungan penimbang sampling. Penghitungan penimbang sampling pada Susenas merupakan tahap untuk generalisasi populasi dengan menggunakan data responden yang berhasil dicacah. Penghitungan penimbang pada Susenas menerapkan tahap penghitungan yang kompleks dan sumber data yang bervariasi. Hasil dari penghitungan penimbang dipengaruhi oleh input data yang tersedia.

4. Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan status gizi anak sekolah dan kelompok rentan, pengentasan kemiskinan melalui perluasan akses pangan bergizi terutama bagi masyarakat miskin, serta penguatan ekonomi melalui keterlibatan berbagai sektor dalam penyediaan makan bergizi. Dampak program MBG secara komprehensif diukur melalui Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG, yang terdiri dari Survei Khusus dan Survei Baseline. Dampak program MBG terhadap indikator ekonomi, ketenagakerjaan, dan sosial diukur melalui Survei Khusus. Pengukuran ini mencakup analisis terhadap

pelaku usaha penyedia layanan makanan, serta perubahan konsumsi dan perilaku rumah tangga dari siswa yang menerima MBG.

Direktorat PMSS dalam hal ini berperan melaksanakan perancangan survei untuk mengukur dampak program MBG. Pada periode survei dampak MBG tahun 2025 terdapat empat jenis survei yang berbeda. Pelaksanaan Survei Khusus Monitoring dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan dua kali, yaitu pada bulan Juni (Tahap I) dan November (Tahap II) tahun 2025, sementara Survei Baseline pada bulan Juli (Tahap I) dan November (Tahap II) 2025.

Responden Survei Khusus adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Supplier (penyedia bahan baku), Sekolah, serta rumah tangga dan siswa yang menerima MBG. Survei dilaksanakan pada 514 kabupaten/kota dengan jumlah sampel sebanyak 8000 siswa, yang tersebar di 1600 sekolah, dan 800 SPPG.

Survei Baseline dilakukan untuk mengukur pengaruh MBG yang diberikan untuk anak sekolah terhadap indikator ketenagakerjaan, perubahan konsumsi rumah tangga, serta perubahan perilaku siswa dan rumah tangga terhadap pola makan bergizi di rumah tangga. Responden Survei Baseline adalah rumah tangga dan siswa baik yang sudah atau belum menerima program MBG dalam SLS terpilih sampel. Survei baseline tahap 1 dan tahap 2 dilakukan secara panel rumah tangga. Sampel tersebar di 514 kabupaten/kota dengan total jumlah sampel sebanyak 81.110 rumah tangga.

Rangkaian kegiatan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG dimulai dari tahap perencanaan (penyusunan rancangan metodologi, instrumen pendataan berupa kuesioner dan buku pedoman, pengembangan moda pencacahan dan web monitoring melalui aplikasi FASIH dan pelatihan petugas), tahap pemutakhiran dan pendataan lapangan, tahap evaluasi (pelaksanaan supervisi, pemeriksaan anomali hasil pendataan, serta penyelenggaraan rapat evaluasi dan koordinasi) hingga penyusunan tabulasi dan analisis hasil pendataan termasuk didalamnya proses menghitung penimbang sampling.

2.4.3. Isu Strategis Nasional

Dukungan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei terhadap kegiatan Isu Strategis Nasional adalah sebagai berikut:

1. Perpres 12 Tahun 2025 Survei Kesejahteraan Petani

Survei Kesejahteraan Petani (SKP) merupakan pelaksanaan mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang diperkuat melalui Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dan BPS. Survei ini dilakukan untuk menghasilkan Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) sebagai instrumen pengukuran berbasis data yang mencerminkan kondisi

kesejahteraan rumah tangga usaha pertanian (RTUP). Cakupan survei meliputi 38 provinsi dan 447 kabupaten/kota dengan populasi responden RTUP pada enam subsektor pertanian, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Pengumpulan data dilakukan melalui survei berbasis sampling dengan moda CAPI (Computer-Assisted Personal Interviewing), menggunakan metode wawancara oleh 3.022 Petugas Pendataan Lapangan dan Petugas Pemeriksaan Lapangan.

Dalam penyelenggaraan survei tersebut, Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei berperan dalam membuat desain, mengambil sampel, menghitung penimbang dan *relative standar error*.

2. UU 16 1997 Sensus Ekonomi

Sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) berkewajiban melaksanakan kegiatan Sensus Ekonomi setiap sepuluh tahun sekali pada tahun yang berakhir angka enam. Sensus Ekonomi di Indonesia telah dilaksanakan sebanyak empat kali yaitu pada tahun 1986, 1996, 2006, dan 2016. Adapun Sensus Ekonomi yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 merupakan Sensus Ekonomi kelima, disebut sebagai Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).

Tahapan kegiatan SE2026 dimulai dari kegiatan perencanaan dan persiapan pada tahun 2024 sampai dengan kegiatan penyajian dan diseminasi hasil pada tahun 2028 yang akan datang. Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei dalam hal ini berperan dari tahap persiapan seperti perhitungan beban petugas dan penyusunan metodologi pendataan. Pada tahap penyusunan metodologi pendataan output yang disiapkan adalah cakupan kegiatan sensus, dukungan KBLI berupa KBLI 2025, alur pendataan secara door to door, instrumen yang digunakan meliputi peta wilayah administrasi (WA) dan peta wilayah Satuan Lingkungan Setempat (WS), kuesioner untuk pemutakhiran (SE2026-P) dan data keluarga serta usaha untuk pemutakhiran yang bersumber dari DTSEN dan SBR. Data SBR bersumber dari hasil integrasi data dari beberapa sumber seperti Sensus Ekonomi 2016, data Kementerian/Lembaga (K/L), data *survey feedback* dari Penanggung Jawab Kegiatan di BPS, dan data input dari BPS Provinsi/BPS Kabupaten/Kota. Data SBR akan dijadikan sebagai *prelist* SE2026.

Dalam rangka persiapan kegiatan SE2026, Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei juga menyelenggarakan Kegiatan Pemutakhiran Kerangka Geospasial dan Muatan Wilkerstat SE2026, di mana kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh muatan wilkerstat yang seragam dan mutakhir, kerangka geospasial yang

mutakhir, dan informasi mengenai wilayah konsentrasi ekonomi. *Output* yang dihasilkan melalui kegiatan ini adalah tersedianya master dan peta wilkerstat terkini yang selanjutnya akan digunakan sebagai kerangka induk dalam pendataan lapangan SE2026 di tahun 2026.

3. Perpres 61 2024 dan Perpres 17 2025 : Data Komoditas Gula, Pergaraman, Jagung, Beras, Daging Lembu, Perikanan, Bawang Putih

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Perpres Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 61 Tahun 2024 mengenai Neraca Komoditas serta Perpres Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, telah dilakukan kegiatan penyediaan data komoditas pangan strategis sebagai bahan evaluasi ketersediaan pasokan pangan nasional. Aktivitas ini berfokus pada pengumpulan, penyusunan, dan penyediaan data yang akurat untuk mendukung perencanaan kebutuhan pasokan dan memastikan stabilitas pangan nasional.

Dalam penyediaan data komoditas tersebut, Direktorat PMSS berperan melaksanakan survei terkait seperti Pengumpulan Data Luas Panen Tanaman Pangan, Survei Ubinan Tanaman Pangan, Pendataan Laporan Pemotongan Ternak Bulanan (LPTB), Pendataan Laporan Triwulanan Pelabuhan Perikanan/Tempat Pelelangan Ikan (PP/TPI), Pendataan Laporan Triwulanan Perndaratan Ikan Tradisional (PIT), Pendataan Tahunan Perusahaan Budidaya Ikan (LTB), dan Pendataan Tahunan Perusahaan Penangkapan Ikan (LTP).

4. Perpres 61 2024 dan Perpres 17 2025 : Survei Konsumsi Bahan Pokok Non Rumah Tangga Tahun 2025

Pelaksanaan Survei Konsumsi Bahan Pokok Non Rumah Tangga (VBNRT) Tahun 2025 dilaksanakan sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 7 Tahun 2025, serta Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, yang menekankan pentingnya ketersediaan data kebutuhan dan konsumsi komoditas pangan strategis secara komprehensif sebagai dasar perencanaan pasokan dan stabilitas pangan nasional.

Kegiatan VBNRT 2025 menjadi isu strategis nasional mengingat data konsumsi pangan yang tersedia secara rutin selama ini masih berfokus pada konsumsi rumah tangga, sementara konsumsi bahan pokok non rumah tangga—yang mencakup sektor penyediaan makanan dan minuman, akomodasi, industri pengolahan pangan, serta institusi seperti rumah sakit, lembaga pemasyarakatan, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Program Makan Bergizi Gratis—belum diperbarui sejak 2017.

Perubahan struktur ekonomi, pertumbuhan sektor jasa, dan implementasi kebijakan strategis pemerintah berpotensi menimbulkan distorsi dalam penghitungan kebutuhan nasional apabila konsumsi non rumah tangga tidak diperhitungkan secara memadai dalam neraca komoditas pangan.

Dalam penyelenggaraan VBPVRT 2025, Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (PMSS) berperan dalam menjamin kualitas statistik melalui perancangan desain survei, penetapan cakupan dan kecukupan sampel minimum, pengembangan metode pembobotan dan estimasi, serta pelaksanaan evaluasi terhadap hasil survei. Peran tersebut memastikan bahwa data yang dihasilkan memenuhi prinsip statistik resmi dan dapat dimanfaatkan secara andal sebagai dasar penyusunan neraca komoditas pangan nasional dan perumusan kebijakan ketahanan pangan berbasis bukti.

5. Penyusunan Data Capaian Indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 dan Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2025–2029 di tingkat Destinasi Pariwisata

Sebagai bagian dari isu strategis nasional di bidang pariwisata, Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (PMSS) berperan dalam Kegiatan Penghitungan Data Capaian Indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 dan Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2025–2029 di tingkat Destinasi Pariwisata. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung efektivitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan melalui penyediaan data indikator pariwisata di destinasi pariwisata prioritas yang akurat, berkala, terintegrasi, serta dapat dipertanggungjawabkan, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

Dalam konteks tersebut, PMSS menjalankan peran sebagai bagian dari tim metodologi melalui penyusunan metodologi penghitungan indikator pariwisata, pelaksanaan analisis atas hasil penghitungan data serta klarifikasi dan evaluasi kualitas data yang diperoleh dari berbagai sumber. PMSS juga berperan dalam mengkoordinasikan pengumpulan pandangan dan masukan dari pemangku kepentingan terkait, serta melakukan penajaman metodologis melalui diskusi teknis, seminar, dan tinjauan lapangan di tingkat destinasi pariwisata.

Melalui peran tersebut, PMSS memastikan bahwa penghitungan capaian indikator RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2025–2029 dilakukan secara konsisten, transparan, dan berbasis metodologi statistik yang andal. Hasil kegiatan ini menjadi landasan penting dalam menilai kinerja pembangunan pariwisata di

tingkat destinasi, memperkuat keterpaduan perencanaan lintas sektor, serta mendukung pengambilan kebijakan pariwisata nasional yang berbasis bukti.

6. Pendukung Penghitungan PDB, PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi pada Kerjasama OECD

OECD memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui proyeksi pertumbuhan, analisis kebijakan, dan proses akses yang bertujuan mendorong reformasi struktural, peningkatan investasi, dan konvergensi standar, yang diproyeksikan akan meningkatkan PDB jangka menengah-panjang Indonesia secara signifikan. Kerjasama ini membantu Indonesia mengadopsi praktik terbaik, menarik investasi, dan menghindari jebakan negara berpendapatan menengah, meskipun tantangan seperti ketidakpastian kebijakan dan ketegangan perdagangan global tetap ada.

Hubungan utama antara *Statistical Business Register* (SBR) dan OECD adalah bahwa SBR merupakan infrastruktur statistik penting yang digunakan oleh negara-negara anggota OECD untuk mengumpulkan, mengelola, dan menghasilkan data statistik bisnis yang berkualitas dan terstandardisasi secara internasional. Berikut adalah poin-poin spesifik yang menjelaskan hubungan tersebut:

- Standardisasi Internasional : OECD bersama dengan organisasi Internasional lainnya seperti Divisi Statistik PBB (UNSD) dan Eurostat, berkolaborasi dalam mengembangkan pedoman dan standar internasional untuk SBR. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan perbandingan data statistik ekonomi antar negara.
- Sumber data berasal dari SBR berfungsi sebagai kerangka utama (*frame*) untuk semua survei ekonomi di suatu negara yang mencakup daftar unit ekonomi, kegiatan dan karakteristiknya. OECD mengumpulkan berbagai statistik mengenai bisnis dan aktivitas bisnis dari negara-negara anggotanya yang sebagian besar datanya berasal dari SBR.
- Pengumpulan data terharmonisasi : OECD mengelola basis data seperti *Structural and Demographic Business Statistics* (SDBS) yang memerlukan data terharmonisasi dari negara-negara anggota. SBR memungkinkan pengumpulan data yang konsisten dengan klasifikasi internasional (seperti ISIC), sehingga data dapat dibandingkan dan digunakan dalam analisis OECD.
- Analisis kebijakan : data bisnis yang berkualitas, yang dimungkinkan oleh SBR yang efektif digunakan oleh OECD untuk melakukan analisis independen dan membentuk rekomendasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kesempatan kerja dan kesejahteraan.

Secara ringkas, SBR adalah alat fundamental di tingkat nasional, sementara OECD adalah organisasi internasional yang mengadvokasi, mempromosikan, dan memanfaatkan data yang dihasilkan melalui SBR yang konsisten dengan standar global untuk tujuan analisis dan koordinasi kebijakan ekonomi.

2.5 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Pagu anggaran tahun 2025 Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei menjalankan fungsi pemerintahan dalam Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik pada awal tahun 2025 sebesar Rp. 2.207.040.000,-. Namun setelah adanya efisiensi anggaran, sisa pagu anggaran menjadi sebesar 1.784.099.000,- termasuk anggaran yang dilakukan *self blocking* sebesar Rp. 1.078.819.000,-. Sehingga anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp 705.280.000,-. Pagu anggaran menurut program/kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3. Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Program dan Sasaran Direktorat PMSS Tahun 2025

No.	Program/ Sasaran	Pagu Anggaran 2025 (Rp)	<i>Self Blocking</i> (Rp)	Pagu yang dapat digunakan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik				
2900 Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei				
1	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektorial Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	264.807.000	240.000.000	24.807.000
2	Terwujudnya Standardisasi Metodologi Kegiatan Statistik yang Terstandar dan Terimplementasikan	1.519.292.000	838.819.000	680.473.000
	Jumlah	1.784.099.000	1.078.819.000	705.280.000

Akuntabilitas kinerja Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei merupakan perwujudan kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PMSS selama satu tahun anggaran 2025 melalui program-program kegiatan diuraikan pada bab ini.

3.1. Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Organisasi Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Tahun 2025

3.1.1. Realisasi dan Capaian Kinerja Direktorat PMSS tahun 2025

Realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 mengalami kenaikan dari target yang ditetapkan untuk kedua sasaran kegiatan/indikator kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi indikator kinerja ‘Tingkat keberhasilan pembinaan statistik sektoral’ yang mencapai 81,17 poin dari target 74,17 poin dengan capaian sebesar 109,44. Demikian pula dengan capaian indikator kinerja “Tingkat ketersediaan metodologi kegiatan statistik yang terstandar dan terimplementasikan” yang mencapai 105,9 persen melebihi target yang ditetapkan sebesar 100 persen. Rata-rata capaian kinerja yang dihasilkan oleh Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei tahun 2025 sebesar 107,67 persen (Tabel 3.1).

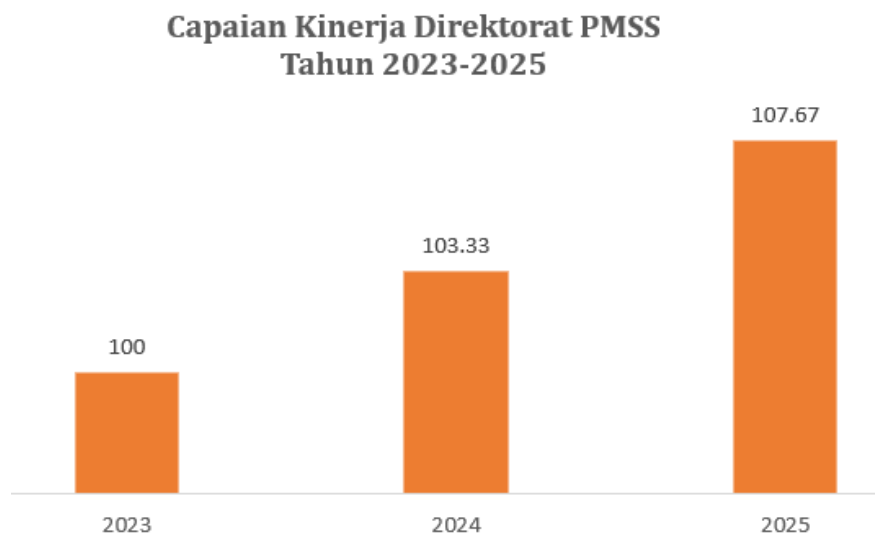
Tabel 3.1 Realisasi dan Capaian Kinerja Direktorat PMSS 2025

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.5.2. Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei 2.5.2.1. Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	74,17 poin	81,17 poin	109,44
2.7.2. Terwujudnya Standardisasi Metodologi Kegiatan Statistik 2.7.2.1. Tingkat Ketersediaan Metodologi Kegiatan Statistik yang Terstandar dan Terimplementasikan	100 persen	105,90 persen	105,90
Rata-rata Capaian Kinerja 2025			107,67

Jika dilakukan perbandingan capaian kinerja total selama 2023-2025, nilainya mengalami kenaikan seperti pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Total Direktorat PMSS tahun 2023-2025

Tahun	Rata-rata Capaian Kinerja			
	TW1	TW2	TW3	TW4
2023	36,34	59	77,35	100
2024	27,57	62,70	79,03	103,33
2025	49,29	72,04	81,34	107,67



Gambar 3.1 Capaian kinerja Direktorat PMSS 2023-2025

Dari hasil penghitungan capaian kinerja dalam rentang waktu 2023-2025 sama-sama menunjukkan hasil yang memuaskan. Kinerja yang dicapai sudah sesuai dan di tahun 2024 dan 2025 cenderung melebihi dari target awal yang ditetapkan di setiap awal tahun.

Capaian kinerja 2025 merupakan pencapaian atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PMSS dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Pencapaian tersebut diukur melalui indikator-indikator tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2025.

3.1.2. Nilai PKO Direktorat PMSS Tahun 2025

Selama tahun 2025, Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik, tercermin dari nilai SAKIP sebesar 72,65 dengan predikat BB (Sangat Baik). Capaian kinerja indikator utama secara kumulatif berada di atas target tahunan, khususnya pada sasaran pembinaan statistik sektoral dan standarisasi metodologi statistik, yang masing-masing mencapai 109,44 dan 105,90. Hasil Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) menunjukkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) rata-rata capaian PK sebesar 96,90 dengan predikat BAIK, artinya tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi. Hal ini menandakan adanya efektivitas pelaksanaan program dan pengendalian kinerja yang konsisten sepanjang tahun. Meskipun terdapat beberapa kendala teknis dan penyesuaian target, langkah mitigasi dan tindak lanjut yang dilakukan mampu menjaga capaian kinerja tetap optimal hingga akhir tahun. Lampiran capaian kinerja selama setahun, serta hasil dan predikat PKO tahun 2025 dari Direktorat PMSS dapat diakses pada tautan berikut ini: http://s.bps.go.id/31000_capkin_TW4_TH2025.

Tabel 3.3 Predikat PKO

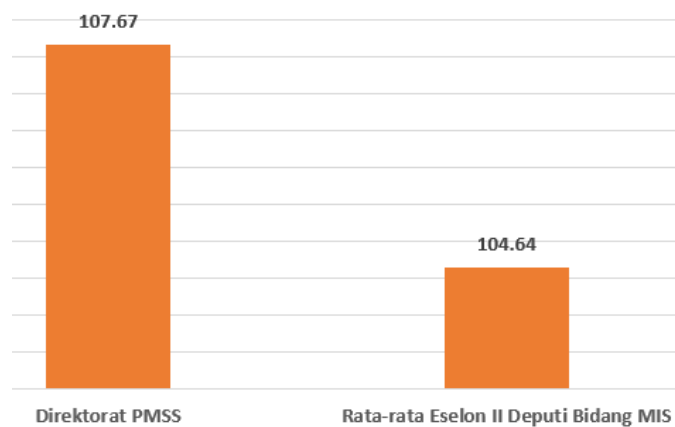
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)	PREDIKAT PKO
$X > 100\%$	ISTIMEWA
$80\% < X \leq 100\%$	BAIK
$60\% < X \leq 80\%$	BUTUH PERBAIKAN
$20\% < X \leq 60\%$	KURANG
$0\% \leq X \leq 20\%$	SANGAT KURANG

Tabel 3.4 Interpretasi Predikat PKO

Predikat Kinerja Organisasi	Interpretasi
ISTIMEWA	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi. Praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi organisasi/unit lain.
BAIK	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.
BUTUH PERBAIKAN	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah cukup baik namun masih dibawah ekspektasi/target.
KURANG	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih kurang dan masih dibawah ekspektasi/target.
SANGAT KURANG	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih sangat kurang dan dibawah ekspektasi/target.

3.1.3. Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat PMSS

Capaian kinerja Direktorat PMSS sudah baik dan melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 107,67. Keberhasilan capaian kinerja tercermin dari indikator pendukung sasaran kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang diupayakan dengan sumber daya yang ada. Sebagai perbandingan, nilai capaian kinerja Direktorat PMSS dan rata-rata capaian kinerja di Kedeputian Bidang Metodologi dan Informasi Statistik dapat dilihat pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

Berdasarkan gambar di atas, Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei memiliki rata-rata capaian kinerja yang lebih tinggi (107,67) dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja Eselon II di Kedeputian Bidang Metodologi dan Informasi Statistik (104,64). Hasil tersebut, tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat PMSS selama tahun 2025, antara lain pengembangan metodologi dalam penyusunan desain dan kerangka sampel terhadap kegiatan survei yang sifatnya *ad hoc*

atau lainnya, pengembangan sistem, pemanfaatan big data, dan pembinaan metodologi statistik.

3.1.4. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

Tabel 3.5. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja 2023-2025

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian Kinerja (%)		
		2023	2024	2025 *)	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Sasaran 1. Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei										
Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Poin	N/A (Belum dijadikan indikator)	74,17	N/A (Belum dijadikan indikator)	81,17	N/A (Belum dijadikan indikator)	109,44			
Sasaran 2. Terwujudnya Standardisasi Metodologi Kegiatan Statistik yang Terstandar dan Terimplementasikan										
Tingkat Ketersediaan Metodologi Kegiatan Statistik yang Terstandar dan Terimplementasikan	Persen	N/A (Belum dijadikan indikator)	100	N/A (Belum dijadikan indikator)	105,9	N/A (Belum dijadikan indikator)	105,9			

Capaian kinerja 2023-2025 hanya bisa dibandingkan dengan nilai capaiannya saja, sementara jika diperinci berdasarkan indikator kinerja tidak bisa dibandingkan dari tahun 2023-2025 karena adanya perbedaan indikator kinerja pada Renstra 2020-2024 dengan Renstra 2025-2029.

3.1.5. Analisis Capaian Kinerja 2025 per IKU

Capaian kinerja yang mencapai lebih dari 100 persen didukung dengan adanya peningkatan dalam pembinaan statistik sektoral, permintaan penyediaan desain dan kerangka sampel survei yang cukup banyak, dan peningkatan jumlah pembinaan statistik dari kementerian/lembaga yang melebihi target. Meskipun demikian, di setiap sasaran masih ada beberapa kendala yang dihadapi. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, telah dilakukan strategi untuk mengatasi berbagai kendala yang terjadi. Berikut ini diuraikan permasalahan yang ditemui dan strategi untuk mengatasi masalah yang telah dirangkum sebagai berikut.

Sasaran 1: Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

Kendala yang dihadapi adalah:

- a. Kurangnya kejelasan di awal mengenai timeline kegiatan atau target triwulanan aktivitas Pembinaan Statistik Sektoral.
- b. Adanya kegiatan lain yang bersamaan dengan waktu pembinaan sehingga pembina yang bertugas membawakan materi tidak dapat hadir di kegiatan pembinaan sesuai pembagian jadwal.
- c. Tidak diselenggarakan EPSS di tahun 2025. Target berubah dikarenakan adanya salah isian di triwulan I, sehingga seharusnya target setiap triwulan mengambil rata-rata nilai tahun lalu
- d. Sebagian kegiatan pembinaan dilakukan di akhir triwulan, sehingga dokumentasi pembinaan belum lengkap diinput
- e. Kegiatan Pembinaan inisiatif Tim Pembina Direktorat PMSS di Luar RK belum terlaksana
- f. Monitoring dan evaluasi mandiri Pembinaan Statistik Sektoral mengharuskan adanya rapat yang dihadiri Direktur. Namun, waktu tersedia dari Direktur adalah di akhir bulan desember (23 Desember 2025) sehingga sudah mendekati batas akhir penilaian monev mandiri.

Solusi mengatasi kendala adalah:

- a. Menyelesaikan tahapan persiapan dan sebagian tahapan pelaksanaan di triwulan 1 dan melakukan koordinasi dengan tim Sekretariat.
- b. Dilakukan penukaran jadwal penyampaian materi dengan pembina yang lain.
- c. Menggunakan kenaikan rata-rata nilai tahun lalu untuk tahun 2025 di setiap target triwulanan. Oleh karena triwulan I salah isian, maka yang semula 0 diubah menjadi 10,83.

- d. Melakukan perubahan jadwal pelaksanaan pembinaan sesuai kesepakatan Tim Pembina dan K/L binaan selama masih pada periode Triwulan III
- e. Proses input dokumentasi kegiatan pembinaan sebagian dilakukan di awal Triwulan IV
- f. Diadakan rapat awalan tanpa Direktur, untuk membagi tugas monev mandiri dan menentukan target waktunya.
- g. Normalisasi Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS Mitra Direktorat digunakan untuk melihat rata-rata kenaikan nilai IPS.

Rencana tindak lanjut:

Berdasarkan hasil dari kedua rapat monitoring dan evaluasi (monev) mandiri, anggota tim melakukan monev mandiri berdasarkan pembagian tugas dan mengupload hasilnya ke Aplikasi Pembinaan Statistik Sektoral paling lambat 31 Desember 2025.

- Melakukan Internalisasi Pembinaan Statistik Sektoral.
- Pembinaan Statistik Sektoral 5 Domain baik secara daring/luring, serta peningkatan pemahaman K/L terhadap penyelenggaraan statistik sektoral di instansi masing-masing.
- Monitoring dan Evaluasi kegiatan PSS.
- Peningkatan kapasitas tim pembina baik yang diadakan oleh Direktorat Diseminasi Statistik, ataupun oleh Direktorat PMSS secara mandiri sesuai kebutuhan.
- Koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga yang diampu.

Sasaran 2: Terwujudnya Standardisasi Metodologi Kegiatan Statistik yang Terstandar dan Terimplementasikan

Kendala yang dihadapi adalah:

- Adanya perubahan rancangan kegiatan statistik yang berdampak pada distribusi sampel.
- Periode IPlan 2 tahun sebelum pelaksanaan kegiatan dapat berdampak pada ketidaksesuaian antara alokasi atau distribusi sampel dengan kondisi populasi di lapangan pada saat pelaksanaan survei.
- Adanya updating/perubahan frame setelah penarikan sampel dilakukan.
- Kurangnya koordinasi dengan PJK sehingga cakupan survei menjadi tidak selaras.
- Cakupan survei yang berubah-ubah.
- Realokasi sampel berulang karena masalah anggaran, ketersediaan data, dan kebutuhan analisis untuk wilayah IKN.
- Perbedaan dari kondisi data proyeksi dengan dasar SUPAS 2015 dan SP2020 serta SP2020 yang telah diperbaiki klasifikasi wilayahnya.

Kendala yang dihadapi (lanjutan):

- Sampel SLS beririsan dengan sampel survei lainnya.
- Frame SPPG dan frame sekolah tidak up to date.
- Adanya efisiensi anggaran sehingga hanya tersisa transport lokal berdampak pada kegiatan Updating Direktori Usaha/Perusahaan Lanjutan mulai dari jumlah sampel, petugas, pelatihan petugas, dan jadwal pelaksanaan.
- Jadwal kegiatan survei di triwulan III-2025 yang padat, sehingga pelaksanaan Updating Direktori Usaha/Perusahaan Ekonomi (UDPE) Lanjutan 2025 tidak selesai di bulan Agustus 2025.
- Susah terkoneksi dengan VPN Developer.
- Adanya Resource Limit pada Matcha Pro.
- Jika jumlah data besar, automatic matching akan lebih lama karena hanya mengandalkan 1 laptop.
- VPN terkadang sulit untuk terhubung (harus dimonitoring secara berkala khususnya saat automatic matching).
- Proses ETL tergantung kompleksitas data yang diterima, ada data yang tidak memiliki variabel provinsi dan kabupaten, sehingga harus memetakan manual dari awal dengan cara mendeteksi dari alamat yang berbentuk text.
- Jika jumlah data besar, kemungkinan proses manual matching yang dilakukan teman-teman juga besar.
- Kurangnya SDM untuk integrasi data SBR dengan PJK BPS/ Kementerian/ Lembaga.
- Data dari Kementerian/Lembaga yang diterima oleh BPS tidak lengkap, seperti kode wilayah tidak sesuai, alamat tidak terisi, dll sehingga dibutuhkan preprocessing data lebih detail.
- Data poligon PAT untuk penambahan sampel KSA padi sebagian besar bukan merupakan sawah dan terdapat pada daerah dengan akses yang sulit.
- Sebagian besar sampel segmen padi dan jagung berada pada wilayah yang sulit dijangkau.
- Penggantian sampel segmen KSA padi dan jagung (terutama padi) dipilih pada segmen yang berdekatan dengan sampel lain sehingga menjadikan distribusi sampel tidak menyebar.
- Adanya perbedaan aplikasi penggantian sampel jagung yang lama dengan yang baru (ada pergeseran segmen).
- Untuk sampel sub KSA padi: Penyediaan data dari PJK terlambat; tidak tersedia informasi perkiraan bulan panen atau durasi waktu budi daya.

Kendala yang dihadapi (lanjutan):

- Banyak dan variasinya jenis usulan penyempurnaan KBLI 2020 yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga membutuhkan tata kelola dokumentasi yang baik dan pengelolaan jawaban usulan melalui diskusi secara transparan dan proporsional, untuk menghasilkan KBLI 2025 sesuai standar ISIC Ver 5 dan memenuhi kebutuhan para pihak secara nasional.
- Proses pembahasan penyempurnaan KBLI 2020 bersama kementerian/lembaga masih menyisakan beberapa pending matters, sehingga dibutuhkan waktu yang melebihi target.
- Aplikasi entri dan pengelolaan SDS belum sesuai kebutuhan. Pembaruan aplikasi oleh Dit. SIS baru dimulai pada April 2025.
- Pembaruan aplikasi entri dan pengelolaan SDS belum selesai, sehingga pengajuan usulan dari K/L dan revidi usulan terhambat.
- SDM perevisi usulan SDS sangat terbatas jumlahnya.
- Ketidakpastian jadwal kegiatan statistik yang menggunakan data MFD.
- Pemutakhiran peta wilkerstat memerlukan master terkini dan pengerjaannya membutuhkan waktu yang lama.
- Kendala teknis dan administrasi pelatihan kegiatan lapangan dan pengolahan peta dan muatan wilkerstat SE2026.
- Terdapat wilayah dengan pola penanaman yang tidak beraturan yang mengurangi kehandalan model.
- Model memiliki kelemahan dalam melakukan permodelan di wilayah terasering, sawah rawa, dan sawah tadah hujan.
- Hasil modelling di beberapa provinsi masih belum optimum.
- Proses komputasi citra satelit yang membutuhkan infrastruktur yang lumayan besar.
- Proses komputasi citra satelit dan pembangunan model machine learning terhambat karena terlalu banyak tim yang running secara bersamaan dan membutuhkan infrastruktur yang besar.
- Keterbatasan anggaran dan pendanaan (tidak ada anggaran pengembangan di 2025).
- Anggaran perjalanan dinas dalam rangka Ground Check Mixed Method yang terbatas.
- Ketersediaan citra sentinel-1 hasil preprocessing dan mosaic dari BRIN di Pulau Kalimantan belum lengkap.
- Belum selesainya proses relasi antara data hasil podes (agregat kecamatan) dengan peta wilayah administrasi BIG karena perbedaan kode BPS dan PUM.

Kendala yang dihadapi (lanjutan):

- Beberapa poligon dari Peta Wilayah Administrasi BIG tidak dapat direalisasikan dengan Data PODES karena perbedaan kode wilayah dan dimungkinkan juga akibat belum dimutakhirkannya master peta wilayah administrasi BIG.
- Perlu dilakukan cleaning dan final cek untuk hasil pengolahan data Podes.
- SDM pengerjaan peta sebagian besar masih baru sehingga perlu belajar lebih untuk memahami dan praktek.
- SDM perlu memahami dan melakukan praktek kembali saat pembuatan peta.
- Tidak adanya acuan atau referensi pembuatan standar data spasial dan metadata di BPS.
- Terdapat tambahan target untuk menghasilkan layer simbologi dalam penyusunan standar data.
- Adanya kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan jumlah kegiatan pembinaan yang dapat ditawarkan menjadi berkurang.
- Jadwal pelaksanaan pembinaan bertepatan dengan proses penyempurnaan KBLI 2020, sehingga menyebabkan keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pelaksanaannya.
- Beberapa jadwal permintaan pembinaan berbarengan dengan pembinaan lainnya.
- Kekurangan personil yang tidak seimbang dengan beban kerja untuk memenuhi undangan dari K/L.
- Kapasitas SDM statistik dan anggaran kegiatan survei di K/L kurang memadai, sehingga pembinaan metodologi belum dapat sepenuhnya diimplementasikan.

Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala adalah:

- Penyesuaian alokasi sampel tanpa revisi DIPA atau penyesuaian level estimasi.
- Berkoordinasi dengan PJK survei terkait dan menentukan tindak lanjut selanjutnya.
- Pengawasan lebih intensif kepada anggota.
- Melakukan penyesuaian kegiatan UDPE Lanjutan menjadi Groundcheck Direktori.
- Melakukan penyesuaian jumlah sampel, petugas dan jadwal pelaksanaan UDPE Lanjutan.
- Memberikan perpanjangan pelaksanaan UDPE Lanjutan sampai September 2025.
- Koordinasi dengan JKD SIS.

Solusi (lanjutan):

- Untuk penambahan sampel KSA padi, kabupaten/kota melakukan penggantian sampel dan jika tidak memungkinkan lagi ada sawah bisa dilakukan lintas kecamatan.
- Untuk penggantian sampel KSA jagung hanya dilakukan pada lokasi yang berbeda.
- Kabupaten/kota melakukan penggantian sampel dengan melihat beberapa persyaratan.
- Tim KSA Pusat tidak meng-approve penggantian sampel yang tidak sesuai ketentuan kecuali karena alasan-alasan tertentu.
- Penggantian sampel.
- Dibuatkan sistem aplikasi manajemen penerimaan dan reviu usulan yaitu Sempurna-KBLI, dan sistem manajemen translasi yaitu Sibaku Rev, serta pembagian waktu diskusi KBLI yang adil dan proporsional kepada K/L untuk menghasilkan penetapan KBLI 2025 yang berkualitas.
- Pembahasan Pending Matters akan dilanjutkan ke level yang lebih tinggi.
- Jadwal susulan akan disusun untuk melaksanakan rapat lanjutan pembahasan KBLI 2020.
- Diskusi dan konfirmasi cakupan KBLI final.
- Konfirmasi terkait kode KBLI yang perlu perbaikan.
- Reviu dan pengelolaan SDS tidak sepenuhnya menggunakan aplikasi, sebagian proses dilakukan di excel.
- Waktu pencarian referensi dan telaah usulan SDS dibatasi agar dapat mereviu usulan lain.
- Pengajuan usulan dan reviu SDS melalui Indah dengan segala keterbatasannya masih dilakukan.
- Harmonisasi hasil reviu SDS secara manual menggunakan Excel.
- BPS memberikan catatan pada usulan SDS yang seharusnya menjadi kewenangan K/L.
- Menunggu kepastian anggaran.
- Updating peta wilkerstat hanya diupload satu kali dalam setahun yaitu kondisi periode semester 1.
- Koordinasi dengan BRIN untuk mendapatkan data citra sentinel-1 hasil Preprocessing.
- Melakukan permintaan data citra sentinel-1 hasil preprocessing tanpa mosaic dari BRIN.

Solusi (lanjutan):

- Koordinasi dengan FAO untuk mendapatkan dan kajian penggunaan data citra resolusi tinggi COSMOSkyMed untuk deteksi fase padi.
- Pengecekan kembali kode relasi BPS-PUM dan penggunaan kode relasi BPS-PUM periode-periode sebelumnya.
- Melakukan penelusuran manual history perubahan wilayah administrasi kecamatan.
- Penggabungan data PODES untuk kecamatan yang mengalami pemekaran, sedangkan untuk kecamatan yang mengalami pemekaran diberikan informasi tersendiri.
- Membuat juknis agar autopilot, perbaikan juknis agar mudah dipahami, dan saling sharing saat kurang paham.
- Juknis selalu diperlukan dan saling sharing jika ada kendala dalam pengerjaannya.
- Pembagian beban tugas kepada pegawai dengan tidak memandang jenjang jabatannya namun paham dengan beban kerja yang diberikan.
- Mengajukan permintaan tambahan SDM dari BPS kabupaten/kota.
- Mengirimkan surat permohonan penempatan magang lulusan Politeknik Statistika STIS angkatan 63 ke Biro SDM.
- Memperoleh magang lulusan Politeknik Statistika STIS angkatan 63 untuk melakukan matching dan olah data.
- Mengingatkan PJK secara intensif untuk mematuhi jadwal penyediaan data.
- Melakukan penyesuaian cakupan fase pertumbuhan padi yang eligible.
- Usulan pada aplikasi KSA ditambahkan 1 pertanyaan untuk mengakomodir informasi bulan perkiraan panen.
- Melakukan smoothing hasil prediksi.
- Pemodelan dilakukan secara terjadwal oleh tim PMSS.
- Penjadwalan dan pelaksanaan pengecekan hasil final.
- Menyesuaikan jadwal pekerjaan dan memprioritaskan proses penghitungan penimbang.
- Running ulang dan validasi hasil bersama PJK.
- Penyesuaian penghitungan penimbang untuk purposif yang banyak.
- Memanfaatkan sumber data alternatif atau informasi frame yang tersedia untuk mengganti frame yang belum siap.
- Matching frame secara otomatis terlebih dahulu karena keterbatasan waktu.

Solusi (lanjutan):

- Pengecekan dan pembersihan data ganda atau berulang.
- Finalisasi cakupan wilayah dan perhitungan minimum sampel dengan beberapa skenario.
- Konsolidasi jumlah sampel dan mendorong perencanaan matang di PJK.
- Frame diperbaiki, terutama di SLS yang muatannya tertukar.
- Diselesaikan pada saat di lapangan.
- Disediakan sampel cadangan.
- Dipilih angka random yang overlapnya paling minimum.
- Penarikan sampel diutamakan yang sudah ditentukan kode komoditasnya.
- Reupload data.
- Foto geotagging yang hilang tidak perlu revisit.
- Foto yang tidak mendapatkan ID wilkerstat diupload melalui web wilkerstat.
- Proses upload diulang saat sinyal bagus dan periksa koneksi atau ganti jaringan.
- Menunggu hasil pengolahan wilkerstat SE2026.
- Diperbaiki dan menunggu sinkronisasi berikutnya untuk data yang telah sesuai.
- Identifikasi SLS hasil pemekaran untuk ditambahkan secara manual di database.
- File final ditunggu untuk diproses tim FRS dan konfirmasi LK menyusul.
- Menggunakan data sesuai kondisi saat diekspor.
- Pembuatan layer simbologi sesuai referensi yang digunakan.
- PIC pembuat peta memeriksa kembali kode kabupaten/kota dan ketelitian penyalinan data.
- Pembinaan dilakukan secara daring.
- Penjadwalan ulang pembinaan di luar periode pembahasan penyempurnaan KBLI.
- Dilakukan penghitungan strata lapangan pekerjaan kembali oleh tim desain pada tingkat SLS, sehingga pada SLS yang dibentuk Sub SLS, diasumsikan strata lapangan pekerjaannya sama untuk seluruh Sub SLS di SLS tersebut.
- Informasi wilayah desa terdampak bencana dibuat klasifikasi sementara, yaitu wilayah yang terparah (terisolir) sampai terdampak saja (kemungkinan masih bisa diakses).
- Penentuan Sub-SLS terpilih oleh BPS kab/kota.
- Koordinasi ke setiap PIC dimaksimalkan. Selain itu, tim Metodologi IBS di PMSS sementara melakukan matching secara mandiri, untuk selanjutnya diserahkan kepada tim SBR di PMSS.

Solusi (lanjutan):

- Tim Metodologi IBS di PMSS melakukan matching secara mandiri dan menyerahkan hasil matching ke tim SBR untuk diverifikasi dan difinalisasi.
- Tim Metodologi IBS di PMSS melakukan deduplikasi dan menyerahkan hasil temuan ke tim SBR untuk diverifikasi dan difinalisasi.
- Mengarahkan BPS Daerah untuk melakukan pemutakhiran data SBR dengan sumber daya yang ada dan cara-cara inovatif.
- Untuk mengatasi permasalahan batas antar provinsi dilaksanakan rekonsiliasi batas yang menghasilkan kesepakatan kedua pihak menentukan batas yang akan digunakan sehingga peta yang dihasilkan tidak lagi tumpang tindih dan beririsan antarprovinsi.
- Pengecekan error yang lama hanya bisa menunggu selesai pengecekan karena kendala server.
- Melakukan cleaning dan preprocessing lebih lanjut agar sesuai dengan standar dan template yang telah disediakan.
- Aplikasi Sistem Pemutakhiran Wilkerstat (SiPW) dibuka kembali agar daerah dapat melakukan entri pembentukan SubSLS yang masih belum selesai.
- Melakukan koordinasi dengan tim SIS untuk progres penyesuaian aplikasi FRS-MFDOOnline secara paralel.
- Memanfaatkan server yang telah tersedia dengan melakukan sejumlah penyesuaian agar tetap dapat mendukung proses otomatisasi.
- Melakukan penyesuaian terhadap timeline pelaksanaan pekerjaan, termasuk perpanjangan jadwal ground check hingga Bulan November 2025.
- Draf peta Podes sudah tersedia dan akan disimpan terlebih dahulu sebelum penyediaan media diseminasi siap.
- Berkomunikasi dengan pihak terkait baik dengan tim JKD jika diperlukan dan tim internal yang bertugas memelihara sistem untuk memulihkan kondisi backend agar sistem berjalan normal.

Rencana tindak lanjut:

1. Persentase ketersediaan desain sensus dan survei yang andal dan dimanfaatkan pengguna lintas sektor..
 - Penyediaan naskah desain dan penyediaan sampel pascaperbaikan permintaan yang dilakukan PJK oleh metodologi.
 - Mengevaluasi desain survei KSA padi (stratifikasi dan distribusi sampel segmen).
2. Persentase ketersediaan kerangka sampel berkualitas dan mutakhir.

- BPS daerah akan melaporkan wilayah sampel yang terdampak bencana melalui laporan hasil identifikasi daftar sampel sesuai tata cara yang ditentukan.
 - Mengirimkan evaluasi *Profiling* ke daerah.
 - Penggantian sampel tetap dilakukan untuk segmen padi maupun jagung setiap bulan dan Tim KSA Pusat perlu menetapkan kembali kriteria penggantian sampel.
3. Persentase ketersediaan publikasi/laporan klasifikasi dan standar data statistik.
 - Melakukan *upload* publikasi *ter-update*.
 4. Persentase ketersediaan master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas..
 - Penyiapan dan pembahasan terkait rancangan kegiatan pengolahan peta hasil SE2026 dan master wilkerstat.
 5. Persentase kegiatan terkait ketersediaan informasi geospasial untuk mendukung pengembangan metodologi sensus dan survei
 - Persiapan kegiatan lapangan (*ground check*) dan *Piloting Mixed Method* (kegiatan dimulai triwulan 1 dan terus berjalan)
 - Rilis diseminasi Peta Podes 2024 menunggu sampai media portalnya sudah siap digunakan dan akan berkoordinasi dengan BIG.
 - Menyiapkan dan mengolah peta Inflasi Desember 2025, Januari dan Februari 2026.
 6. Persentase pembinaan statistik bidang metodologi sensus dan survei yang dilaksanakan
 - Menghadiri dan mempersiapkan rapat yang berkaitan dengan pembinaan metodologi statistik, klasifikasi statistik dan standar data statistik.

3.2. Capaian Kinerja Direktorat PMSS Terhadap Target Renstra

Secara umum, jika capaian 2025 dibandingkan dengan target 2025 pada Renstra 2025-2029, kedua sasaran program sudah mencapai target dengan rata-rata capaian sebesar lebih dari 100 persen. Sementara itu, jika capaian dibandingkan terhadap target 2029, baru mencapai 86,7 persen untuk indikator kinerja Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektorale Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei dan mencapai 105,9 persen untuk indikator kinerja Tingkat Ketersediaan Metodologi Kegiatan Statistik yang Terstandar dan Terimplementasikan. Tabel realisasi kinerja per IKU tahun 2025 terhadap target Renstra tahun 2029 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6 Capaian kinerja Direktorat PMSS terhadap target Renstra

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025*)	Target 2029*)	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025	Capaian Terhadap Target 2029
Sasaran 1. Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei						
Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Poin	74,17	93,62	81,17	109,44	86,7
Sasaran 2. Terwujudnya Standardisasi Metodologi Kegiatan Statistik						
Tingkat Ketersediaan Metodologi Kegiatan Statistik yang Terstandar dan Terimplementasikan	Persen	100	100	105,9	105,9	105,9

Faktor-faktor yang mendorong ketercapaian target adalah:

- a. SDM berkualitas yang dapat mencapai output yang maksimal
- b. Tata kelola, proses bisnis, dan budaya kerja yang memanfaatkan teknologi digital.
- c. Perencanaan yang baik dengan proses bisnis yang terarah
- d. Koordinasi yang kuat dengan Kementerian/Lembaga

Faktor-faktor yang menghambat ketercapaian target adalah:

- a. Keterbatasan dan ketidakpastian anggaran
- b. Kuantitas SDM yang belum mencukupi
- c. Keterbatasan infrastruktur IT

3.3. Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025

3.3.1 Output yang Dihasilkan

1. Prioritas Nasional

a. Pembinaan Statistik Sektoral

Output dari kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral di Direktorat PMSS adalah terselenggaranya pembinaan untuk kegiatan statistik kepada 6 (enam) Kementerian/Lembaga yaitu: (1) Badan Informasi Geospasial (BIG), (2) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), (3) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), (4) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), (5) Badan Standardisasi Nasional (BSN), dan (6) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) yang tertuang di dalam Laporan Kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral 2025 Direktorat PMSS



b. Publikasi/Laporan Penyusunan Inflasi

Output yang dihasilkan adalah publikasi digital berupa webmap peta Inflasi yang dirilis setiap bulan selama tahun 2025.

c. Pemanfaatan Big Data untuk Statistik Resmi

Kegiatan MPD:

Desain survei Digital Wisatawan Nusantara dan Survei Digital Wisatawan Nasional, termasuk di dalamnya hasil perhitungan kecukupan sampel, metode estimasi dan dataset hasil pendataan yang sudah dilakukan pembobotan dan estimasi indikator utama seperti pengeluaran wisatawan.

Kegiatan Mixed Method:

Output berupa model prediksi fase tumbuh padi, hasil estimasi luas panen, dan laporan Mixed Method tahunan untuk menunjang statistik data beras.

d. Penyediaan Data dan Informasi Ekonomi Digital

Desain survei E-Commerce termasuk di dalamnya pengelolaan kerangka sampel, perhitungan kecukupan dan alokasi sampel per wilayah cakupan, metode estimasi dan dataset hasil pendataan lapangan yang sudah dilakukan pembobotan dan estimasi indikator utama seperti jumlah usaha yang menerapkan ekonomi digital dan nilai pendapatan ekonomi digital menurut domain estimasi

2. Prioritas Presiden

a. Inpres Nomor 4 Tahun 2025 : DTSEN

Output yang dihasilkan dalam pemanfaatan DTSEN sebagai kerangka sampel induk (*master sampling frame*) antara lain:

1. Tersedianya kerangka sampel induk berbasis DTSEN yang dimanfaatkan secara konsisten dalam penyusunan *prelist* sensus dan survei di BPS, sehingga menghasilkan daftar awal unit observasi yang lebih mutakhir, komprehensif, dan terstandar.
2. Tersusunnya dasar penentuan sampel EA dan alokasi beban kerja petugas lapangan yang lebih akurat melalui pemanfaatan rekapitulasi jumlah individu dan keluarga dari DTSEN.
3. Terbangunnya mekanisme umpan balik dua arah antara DTSEN dan kegiatan sensus-survei BPS, di mana hasil pemutakhiran dan *listing* keluarga digunakan untuk memperbarui *frame* DTSEN pada atribut identitas wilkerstat BPS hingga level SLS, sehingga mendukung terwujudnya sistem data sosial dan ekonomi nasional yang terintegrasi, mutakhir, dan berkualitas.

b. Inpres 6 2025 : Survei KSA Padi, Survei Ubinan Padi

Output yang dihasilkan dalam kegiatan Survei KSA padi dan jagung adalah:

1. Pemutakhiran kerangka sampel dengan adanya penambahan poligon PAT dari Kementerian Pertanian
2. Daftar penggantian sampel KSA padi dan jagung yang di-*approve* dan menjadi target sampel terbaru.

Output pada Survei Ubinan padi meliputi desain survei, desain sampel (alokasi dan daftar sampel rumah tangga usaha pertanian), dan pengukuran akurasi hasil survei (*relative standard error/RSE*) indikator utama hasil survei.

3. Isu Strategis Nasional

a. Perpres 12 2025 Survei Kesejahteraan Petani

Output Dit. PMSS pada kegiatan SKP adalah desain survei, desain sampel (alokasi dan daftar sampel rumah tangga usaha pertanian), dan pengukuran akurasi hasil survei (*relative standard error/RSE*) indikator utama hasil survei.

b. UU No.16 Tahun 1997 : Sensus Ekonomi

Output yang dihasilkan oleh Direktorat PMSS adalah pada sisi perencanaan perhitungan jumlah petugas. Selain itu, dihasilkan juga metodologi pendataan secara door-to-door serta penyusunan instrumen untuk pemutakhiran (SE2026-P). Direktorat PMSS juga menyiapkan data keluarga yang bersumber dari DTSEN dan data usaha yang bersumber dari SBR sebagai data prelist.

Dalam kegiatan Pemutakhiran Kerangka Geospasial dan Muatan Wilkerstat SE2026, output yang dihasilkan adalah master dan peta wilkerstat yang mutakhir kondisi 2025 semester 1

c. Perpres 61 2024 dan Perpres 17 2025 : Survei Konsumsi Bahan Pokok Non Rumah Tangga Tahun 2025 Penyusunan Data Capaian Indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 dan Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2025–2029 di tingkat Destinasi Pariwisata

Output yang dihasilkan oleh Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei adalah telaah kecukupan sampel dan metode perhitungan indikator yang dirangkum di dalam laporan bersama Tim Teknis lain terkait Perhitungan Indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 dan Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2025–2029 di tingkat Destinasi Pariwisata.

3.3.2 Kendala, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut Setiap Prioritas

1. Prioritas Nasional

a. Pembinaan Statistik Sektoral

Kendala yang dialami pada kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral antara lain Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani statistik sektoral di Direktorat PMSS sebagian besar masih merangkap tugas lain, sehingga terkadang kurang optimal dalam melakukan penyelenggaraan PSS. Begitu pula dari sisi K/L yang dibina, jumlah SDM yang menangani statistik sektoral di K/L binaan relatif terbatas, khususnya dengan jabatan fungsional statistisi. Selain itu, kegiatan statistik yang dimiliki oleh seluruh K/L (6 K/L) yang dibina oleh

Direktorat PMSS merupakan jenis pengumpulan data melalui Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin). Tahapan kegiatan kompromin cenderung memiliki tahapan yang tidak lengkap seperti Survei/Sensus, sehingga pemenuhan bukti dukung menjadi kurang maksimal.

Solusi yang dilakukan adalah dengan membangun komunikasi yang baik dengan tim K/L binaan, memfasilitasi kegiatan konsultasi jika K/L membutuhkan, pendampingan intensif, serta pemberian materi pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman masing-masing K/L binaan, serta mendorong K/L untuk memanfaatkan coaching clinic pada proses penyelenggaraan statistik seperti penyusunan metadata, standar data, pengajuan romantik, jika dirasa kurang cukup dengan tim Pembina.

Adapun rencana kegiatan sebagai tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan pelaksanaan kegiatan pembinaan dengan beberapa kondisi agar anggaran tidak menjadi kendala.
 2. Melakukan Internalisasi Pembinaan Statistik Sektoral.
 3. Pembinaan Statistik Sektoral 5 Domain baik secara daring/luring, serta peningkatan pemahaman K/L terhadap penyelenggaraan statistik sektoral di instansi masing-masing.
 4. Monitoring dan Evaluasi kegiatan PSS.
 5. Peningkatan kapasitas tim pembina baik yang diadakan oleh Direktorat Diseminasi Statistik, ataupun oleh Direktorat PMSS secara mandiri sesuai kebutuhan.
 6. Koordinasi baik dengan Kementerian/Lembaga yang diampu.
- b. Publikasi/Laporan Penyusunan Inflasi

Kendala yang dihadapi sistem *backend* yang tidak dapat diakses. Hal ini menyebabkan data tidak bisa diinput dan keterlambatan pada tersedianya *webmap* inflasi dari jadwal yang ditargetkan.

Solusi yang dilakukan adalah berkomunikasi dengan pihak terkait baik dengan tim JKD jika diperlukan dan tim internal yang bertugas memelihara sistem untuk memulihkan kondisi *backend* agar sistem berjalan normal.

Rencana tindak lanjut dari kegiatan ini adalah:

1. Menetapkan tim kerja yang melibatkan unsur statistik, geospasial, dan teknologi informasi.
2. Melakukan *sharing knowledge* jika terjadi perubahan tim.
3. Melakukan dengan unit terkait sebagai penyedia data inflasi.

4. Pemeliharaan sistem agar selalu tersedia.
 5. Penyediaan peta tematik inflasi berbasis *web* sesuai waktu yang ditentukan.
- c. Pemanfaatan Big Data untuk Statistik Resmi

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Proyek Mixed Method antara lain keterlambatan pengiriman citra satelit Sentinel-1 dari BRIN yang berdampak pada tertundanya proses pengolahan dan prediksi fase tumbuh padi. Selain itu, hingga akhir tahun 2025 belum tersedianya data KSA tahun 2025 sehingga perbaikan model Mixed Method untuk tahun 2025 belum dapat dilakukan secara optimal. Dari sisi sistem, sempat terjadi kendala teknis pada PDNS yang menghambat proses pengembangan di environment JupyterLab. Kendala lainnya adalah proses pembuatan service peta digital hasil pemodelan fase tumbuh padi yang membutuhkan resource komputasi yang cukup besar.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pusdatin BRIN terkait keterlambatan pengiriman citra satelit. Sebagai langkah mitigasi ke depan, pengolahan citra akan dilakukan secara mandiri sementara sebelum citra resmi dari BRIN diterima. Untuk mengatasi keterbatasan data KSA tahun 2025, digunakan data prior tahun 2024 sebagai dasar untuk melakukan refinement model fase tumbuh padi. Terkait kendala sistem, dilakukan koordinasi dengan tim JKD untuk memulihkan kondisi PDNS agar proses pengembangan dapat kembali berjalan normal. Adapun pembuatan service peta digital dilakukan secara bertahap dan manual guna menyesuaikan dengan ketersediaan resource.

Rencana tindak lanjut dari kegiatan ini adalah:

1. Membentuk tim kerja yang melibatkan tim statistik tanaman pangan untuk mengawal dan memastikan kualitas hasil Proyek Mixed Method.
2. Melaksanakan piloting Mixed Method yang berjalan beriringan dengan pelaksanaan survei KSA.
3. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap hasil Mixed Method bersama tim statistik tanaman pangan.
4. Mengembangkan model produktivitas padi serta melakukan inisiasi pengembangan model crop data layer untuk komoditas jagung.
5. Melaksanakan ground check sebagai bagian dari tahapan awal pembangunan model Mixed Method untuk komoditas jagung.

2. Prioritas Presiden

a. Inpres Nomor 4 Tahun 2025 : DTSEN

Kendala dalam pemanfaatan DTSEN sebagai *master sampling frame* yaitu integrasi dan sinkronisasi hasil pemutakhiran sensus-survei BPS dengan DTSEN yang belum sepenuhnya otomatis sehingga menyebabkan potensi keterlambatan dalam *updating frame* dan meningkatkan beban kerja dalam proses konsolidasi serta pengendalian kualitas.

b. Inpres 6 2025 : Survei KSA Padi, Survei Ubinan Padi

Kendala Survei KSA padi lebih pada lokasi segmen padi yang sulit dijangkau dan penggantian sampel yang tidak sesuai dengan persyaratan yang menyebabkan distribusi sampel tidak merata. Untuk solusi atas kendala ini adalah BPS kabupaten/kota diperbolehkan mengganti sampel dengan melihat persyaratan. Sementara terkait penggantian sampel yang berdekatan tidak di-approve oleh BPS Pusat. Rencana tindak lanjut terkait kegiatan Survei KSA padi adalah perlunya peninjauan kembali terkait persyaratan penggantian sampel KSA padi.

Kendala perancangan Survei Ubinan padi antara lain jadwal pengiriman data fase pertumbuhan padi di setiap subsegmen hasil Survei KSA untuk alokasi sampel subsegmen padi masih terkendala waktu dan kerangka sampel subsegmen yang diperkirakan ada panen belum sesuai target sampel. Hal ini disebabkan perencanaan survei menggunakan data perkiraan panen tahun-tahun sebelumnya, sedangkan pengambilan sampel didasarkan pada data dua bulan sebelumnya pada tahun berjalan. Solusi yang dilakukan antara lain penyesuaian waktu alokasi dan pengambilan sampel.

3. Isu Strategis Nasional

a. Perpres 12 2025 Survei Kesejahteraan Petani

Tidak ada kendala

b. UU No.16 Tahun 1997 : Sensus Ekonomi

Kendala yang dialami dalam penyesuaian metodologi sensus ekonomi dan perhitungan beban petugas adalah anggaran yang belum pasti. Ketidakpastian anggaran tersebut mendorong perubahan metode dan perubahan perhitungan petugas yang dinamis.

Kendala dalam kegiatan Pemutakhiran Kerangka Geospasial dan Muatan Wilkerstat adalah kendala teknis lapamgan, keterbatasan server, belum sempurnanya sistem aplikasi pengolahan muatan dan peta, dan masalah perbatasan antar provinsi yang mengakibatkan penyelesaian peta terhambat.

Solusi yang dilakukan membuat pedoman teknis yang jelas disertai dengan video pembelajaran, perbaikan dan pengembangan sistem melalui koordinasi dengan SIS, dan menyelenggarakan rekonsiliasi antar provinsi untuk membahas kesepakatan batas yang sesuai.

Rencana tindak lanjut adalah master dan peta wilkerstat yang mutakhir dijadikan kerangka induk untuk pendataan lapangan SE2026 di tahun 2026.

3.4. Prestasi dan Inovasi Direktorat PMSS

Pada tahun 2025, Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei mencatat sejumlah capaian prestasi strategis di tingkat nasional dan internasional. Adapun capaian tersebut diantaranya:

1. Direktorat PMSS berkontribusi signifikan dalam capaian Indonesia sebagai penerima penghargaan internasional, 2025 GEO SDG Award, pada kategori GEO *Member Country*. Penghargaan ini diberikan atas inovasi pengembangan metodologi statistik melalui penerapan pendekatan *Mixed Method*, khususnya pemanfaatan citra satelit (*Earth Observation*) untuk prediksi fase tumbuh padi (crop phenology) dan estimasi luas panen.
2. Direktorat PMSS turut berpartisipasi dalam publikasi internasional yang difasilitasi oleh UNSD–FAO berjudul “*Earth Observation Data for Paddy Crop Phenology Identification*”. Publikasi ini mendokumentasikan praktik terbaik Indonesia dalam penerapan pendekatan *Mixed Method* untuk mengidentifikasi fase pertumbuhan padi melalui integrasi data citra satelit multi-sumber dengan data statistik pertanian berbasis survei.
3. Direktorat PMSS juga berpartisipasi aktif dalam penyusunan UN Handbook FAO berjudul “*Mapping Crop Phenology in Indonesia*”, yang menjadi referensi internasional dalam pemetaan fase tumbuh tanaman pangan.
4. Direktorat PMSS turut berpartisipasi dalam SDMX Global Conference 2025 yang diikuti secara daring sebagai salah satu penyaji materi berjudul “*Indonesia’s Statistical Data Standards: A Practical Combination of Statistical Ontology Implementation with SDMX Structure*”.
5. Direktorat PMSS mendapat penghargaan atas pencapaian dalam pengelolaan arsip di lingkungan unit kerjanya dengan nilai audit kearsipan internal tahun 2025 berkategori A (memuaskan).

Inovasi yang telah dicapai Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei pada tahun 2025 di antaranya:

- 1 Inovasi yang dilakukan oleh Tim Pengembangan Register Usaha Tahun 2025 terkait pengembangan aplikasi Matchapro Web yang dapat digunakan sebagai pemutakhiran data SBR yaitu *matching* data dan *profiling* oleh BPS Provinsi/ Kabupaten/Kota. Selain itu, dikembangkan juga aplikasi Matchapro Mobile pada Desember 2025 sebagai pelaksanaan *Ground Check* Pra-Prelist SE2026.
- 2 Pembangunan aplikasi berbasis web untuk manajemen pengelolaan usulan penyempurnaan KBLI 2020 (Simpurna-KBLI) serta sistem pengolahan dan translasi ISIC-KBLI (Sibaku-Rev) guna memfasilitasi tim internal dalam proses pemutakhiran KBLI 2020 sampai dengan penyusunan KBLI 2025.

3.5. Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025

Pagu anggaran tahun 2025 Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei menjalankan fungsi pemerintahan dalam Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik tahun 2025 sebesar Rp. 1.784.099.000,-. Dari anggaran tersebut dilakukan *self blocking* sebesar Rp.1.078.819.000. Realisasi anggaran Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Tahun 2025 adalah Rp 24.625.226,- untuk indikator kinerja Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei dengan pagu sebesar Rp 24.807.000,-. Sementara untuk indikator kinerja Tingkat Ketersediaan Metodologi Kegiatan Statistik yang Terstandar dan Terimplementasikan, realisasi anggaran sebesar Rp 648.880.035,- dari pagu anggaran sebesar Rp 680.473.000,-.

Tabel 3.7. Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Program dan Sasaran Direktorat PMSS Tahun 2025

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Pagu Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran 2025 (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran 2025 (%)	Efisiensi
Sasaran 1. Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/ Lembaga Mitra Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei								
Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Persen	74,17	81,17	109,44	24.807.000	24.625.226	99,27	1,1024

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Pagu Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran 2025 (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran 2025 (%)	Efisiensi
Sasaran 2. Terwujudnya Standardisasi Metodologi Kegiatan Statistik yang Terstandar dan Terimplementasikan								
Tingkat Ketersediaan Metodologi Kegiatan Statistik yang Terstandar dan Terimplementasikan	Persen	100	105,9	105,9	680.473.000	648.880.035	95,36	1,2584
Total					705.280.000	673.505.261	95,49	

Tabel 3.8. Pagu dan Realisasi Anggaran Setelah *Self Blocking*

No.	Program/ Sasaran	Pagu 2025 (Rp)	Self Blocking (Rp)	Realisasi s/d Desember 2025 (Rp)	Persentase Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik					
2900 Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei					
1	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektorial Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	264.807.000	240.000.000	24.625.226	99,27
2	Terwujudnya Standardisasi Metodologi Kegiatan Statistik yang Terstandar dan Terimplementasikan	1.519.292.000	838.819.000	648.880.035	95,36
	Jumlah	1.784.099.000	1.078.819.000	673.505.261	95,49

Secara umum, penyerapan anggaran pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik sudah dilakukan dengan sangat maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi anggaran sebesar 95,49 persen. Penggunaan anggaran oleh Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei sudah sangat efisien yang ditunjukkan dengan nilai efisiensi 1,1. Beberapa upaya telah dilakukan dalam efisiensi anggaran adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pelatihan dan briefing online pada berbagai pelaksanaan, seperti pelatihan instruktur utama dan instruktur nasional dari kegiatan Pemutakhiran

Kerangka Geospasial dan Muatan Wilkerstat SE2026 dan Profiling dan Updating Direktori Usaha/Perusahaan Ekonomi Lanjutan;

2. Melakukan penyesuaian jumlah sampel, jumlah petugas, dan jadwal kegiatan, salah satunya di kegiatan Updating Direktori Usaha/Perusahaan Ekonomi Lanjutan; dan
3. Memanfaatkan fasilitas kantor untuk melakukan pembinaan statistik sektoral, rapat Koordinasi dan Tindak Lanjut Usulan Penyempurnaan KBLI 2020, integrasi data dengan Kementerian/Lembaga, harmonisasi rancangan Peraturan BPS tentang KBLI 2025, briefing persiapan pelaksanaan verifikasi klasifikasi urban rural dengan BPS daerah, dan lain-lain.

4.1. Kesimpulan

Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Direktorat PMSS menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja menunjukkan tingkat keberhasilan. Kesimpulan ini tercermin dari Indikator Kinerja Utama sebagai acuan tingkat keberhasilan. Semua target sasaran strategis yang telah ditetapkan berhasil dicapai dengan tingkat pencapaian indikator secara rata-rata di atas 100 persen, karena banyak permintaan pembinaan terkait metodologi desain, kerangka sampel, klasifikasi dan standar data statistik baik dari internal maupun dari eksternal BPS.

4.2. Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut

Semakin banyaknya indikator statistik yang diperlukan oleh pengambil kebijakan menjadi tantangan bagi Direktorat PMSS untuk dapat menyusun metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas. Tindak lanjut atas evaluasi kinerja tahun 2025 adalah:

- 1) Pemanfaatan hasil klasifikasi desa perkotaan dan perdesaan (urban-rural) tahun 2025 di dalam penyusunan metodologi sensus dan survei BPS berikutnya.
- 2) Penggunaan wilayah Satuan Lingkungan Setempat (SLS) sebagai *Enumeration Area* (EA) di seluruh kegiatan sensus dan survei BPS berikutnya.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pernyataan Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT PENGEMBANGAN METODOLOGI SENSUS DAN SURVEI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Kadarmanto, M.A.
Jabatan : Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat
Jabatan : Pjt. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat
NIP. 19710815199312 2 002

Palembang, 24 Januari 2025
Pihak Pertama


Dr. Kadarmanto, M.A.
NIP. 19710707199312 1 001

Pernyataan Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Tahun 2025 (lanjutan)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENGEMBANGAN METODOLOGI SENSUS DAN SURVEI

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terwujudnya Standardisasi Metodologi Kegiatan Statistik	Tingkat Ketersediaan Metodologi Kegiatan Statistik yang Terstandar dan Terimplementasikan	100,00 Persen
2.	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	74,17 Poin

Program/Kegiatan		Anggaran	
1)	2900 Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Rp.	2.207.040.000
Jumlah		Rp.	2.207.040.000

Plt. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik


Dr. Pudi Ismartini, M.App.Stat
NIP. 19710815199312 2 002

Palembang, 24 Januari 2025
Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei


Dr. Kadarmanto, M.A.
NIP. 19710707199312 1 001

Lampiran 2 Jumlah Pegawai Direktorat PMSS menurut Tingkat Pendidikan tahun 2025

No	Jabatan	Jenjang Pendidikan					Jumlah
		S3	S2	S1/DIV	DIII	SLTA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Direktur	1					1
2	Statistisi Ahli Utama	1					1
3	Statistisi Ahli Madya	2	8	1			11
4	Statistisi Ahli Muda		12	13			25
5	Statistisi Ahli Pertama			11			11
6	Pranata Komputer Ahli Madya	1					1
7	Pranata Komputer Ahli Muda			2			2
8	Pranata Komputer Ahli Pertama			10			10
9	Staf			1			1
10	Fungsional Umum		1			2	3
Jumlah		5	21	38	0	2	66

Lampiran 3 Jumlah Pegawai Direktorat PMSS menurut Golongan Kepangkatan tahun 2025

No	Jabatan	Golongan Kepangkatan									Jumlah
		IIIa	IIIb	IIIc	IIId	IVa	IV b	IVc	IVd	IVe	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Direktur								1		1
2	Statistisi Ahli Utama									1	1
3	Statistisi Ahli Madya					5	5	1			11
4	Statistisi Ahli Muda			10	13	2					25
5	Statistisi Ahli Pertama	2	9								11
6	Pranata Komputer Ahli Madya						1				1
7	Pranata Komputer Ahli Muda			1	1						2
8	Pranata Komputer Ahli Pertama	5	5								10
9	Staf	1									1
10	Fungsional Umum		2			1					3
Jumlah		8	16	11	14	8	6	1	1	1	66

Lampiran 4 Jumlah Pejabat Fungsional Direktorat PMSS tahun 2025

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)
1	Statistisi Ahli Utama	1		1
2	Statistisi Ahli Madya	3	8	11
3	Statistisi Ahli Muda	9	16	25
4	Statistisi Ahli Pertama	6	5	11
5	Pranata Komputer Ahli Madya		1	1
6	Pranata Komputer Ahli Muda	2		2
7	Pranata Komputer Ahli Pertama	7	3	10
Jumlah		28	33	61

Lampiran 5 Daftar K/L/Pemda Target Pembinaan Tahun 2025

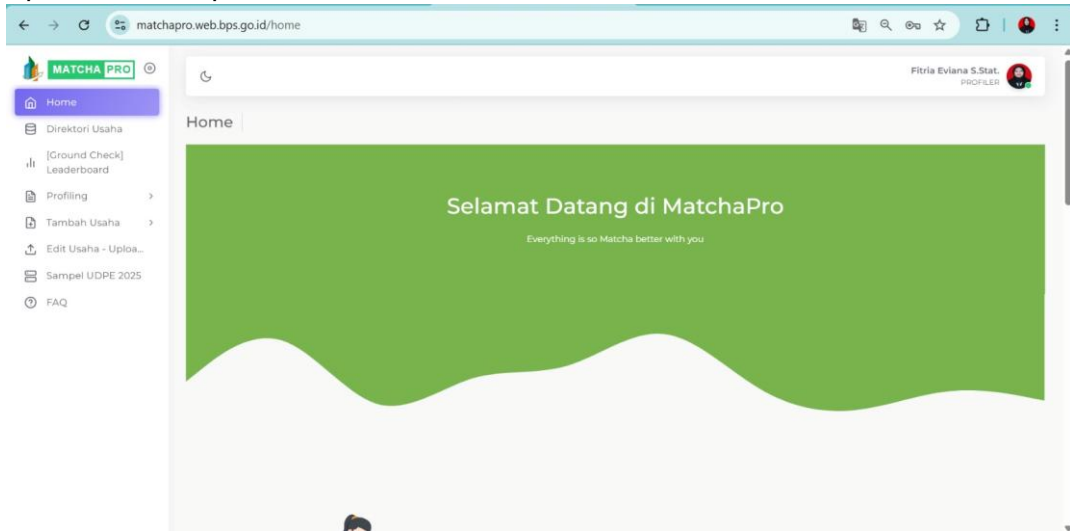
No.	Daftar Nama Kementerian/Lembaga
1.	Mahkamah Konstitusi RI
2.	Badan Informasi Geospasial
3.	Badan Standardisasi Nasional
4.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
5.	Badan Pengawas Obat dan Makanan
6.	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Lampiran 6 Daftar Prestasi/Penghargaan Direktorat PMSS Tahun 2025

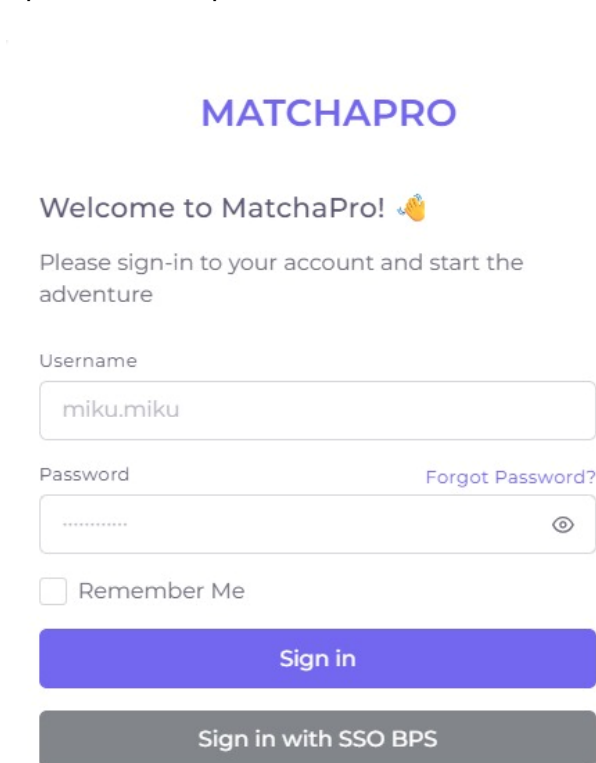


Lampiran 7 Daftar Inovasi Direktorat PMSS Tahun 2025

Aplikasi Matchapro Web

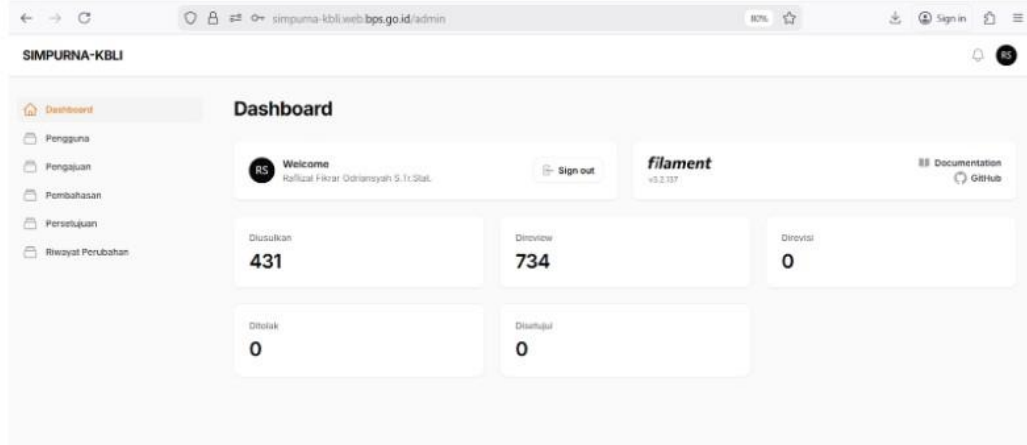


Aplikasi Matchapro Mobile

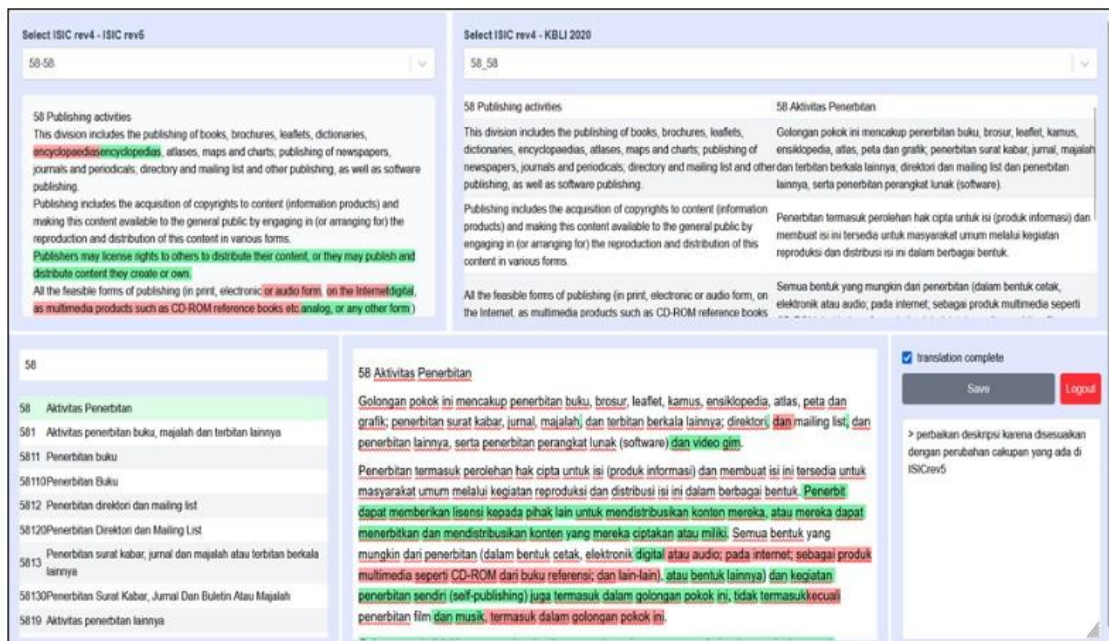


Daftar Inovasi Direktorat PMSS Tahun 2025 (lanjutan)

Aplikasi Web Simpurna-KBLI



Aplikasi Web Sibaku-Rev



Lampiran 8 Alokasi Anggaran Belanja dan Capaian Kinerja Direktorat PMSS TA 2025

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Pagu Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran 2025 (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran 2025 (%)
Sasaran strategis 2.5.2: Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei							
Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Persen	74,17	81,17	109,44	24.807.000	24.625.226	99,27
Sasaran Strategis 2.7.2: Terwujudnya Standardisasi Metodologi Kegiatan Statistik							
Tingkat Ketersediaan Metodologi Kegiatan Statistik yang Terstandar dan Terimplementasikan	Persen	100	105,9	105,9	680.473.000	648.880.035	95,36
Total					705.280.000	673.505.261	95,49



SENSUS
EKONOMI
2026

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK